

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **a. Kondisi Geografis**

Kota Batu, secara geografis berada pada 7<sup>0</sup>44'–8<sup>0</sup>26' Lintang Selatan dan 122<sup>0</sup>17'–122<sup>0</sup>57' Bujur Timur dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42 % dari total luas Jawa Timur, serta secara administratif dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Kec. Pacet Kab. Mojokerto dan  
Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan, G. Arjuno  
Sebelah Timur : Kec. Karangploso dan Kec. Dau  
Kabupaten Malang  
Sebelah Selatan : Kec. Dau dan Kec. Wagir  
Kabupaten Malang  
Sebelah Barat : Kec. Pujon Kabupaten Malang

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, wilayah administratif Kota Batu terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terdiri dari 19 desa, 5 kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Batu mempunyai 8 desa/kelurahan, Kecamatan Junrejo mempunyai 7 desa/kelurahan dan Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 9 desa.

Secara geografis, wilayah Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah dengan ketinggian bergelombang dan

berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar, meskipun berada pada ketinggian  $\pm 800$  M dari permukaan laut. Kota Batu memiliki suhu minimum  $18^{\circ}$ - $24^{\circ}$  C, suhu maksimum antara  $28^{\circ}$ - $32^{\circ}$  C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dengan volume curah hujan rata-rata 298 mm per bulan dalam kisaran 6 hari per bulan.

#### **a) Topografi**

Bentang geografi Kota Batu yang berupa perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian  $\pm 800$  meter di atas permukaan laut berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung Welirang atau Kemukus (3.156 m). Desa Oro-Oro Ombo dan kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Tlekung dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo serta hampir seluruh desa di Kecamatan Bumiaji merupakan areal perbukitan. Desa Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Tulungrejo, Sumbergondo, dan Giripurno berrelief terjal. Sedangkan desa/kelurahan lainnya relatif datar. Kondisi demikian, menjadikan Kota Batu berhawa sejuk dengan suhu udara berkisar antara  $17 - 25^{\circ}$  C.

#### **b) Geologi**

Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah

alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

### **c) Hidrologi**

Kondisi hidrologi Kota Batu banyak di pengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota, sehingga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan kota. Hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi 3 (tiga ) jenis yaitu air permukaan, air tanah dan sumber mata air. Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan.

### **d) Klimatologi**

Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014, hujan terjadi di setiap bulan, kecuali bulan Juli dan September. Kondisi cuaca tahun 2014 relatif lebih basah dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Bina Marga mencapai rata-rata 147,31 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 157 hari. Sementara pada periode sebelumnya, rata-rata tinggi curah hujan hanya 122.25 mm/bulan dengan

jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. Ini berarti tahun 2014 lebih banyak hujan dibandingkan tahun 2013.

Sejalan dengan tingkat kelembaban daerah lainnya di Jawa Timur, tingkat kelembaban udara di Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur yaitu sebesar 31 % (minimum) pada bulan September serta yang tertinggi sebesar 98 % (maksimum) pada bulan Maret.

#### **b. Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan lahan di wilayah Kota Batu terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah, luas untuk lahan sawah sebesar 2.513,00 Ha atau 12,6 persen sedangkan lahan bukan sawah sebesar 17.395,72 Ha atau sekitar 87,4 persen. Kecamatan Junrejo yang paling luas lahannya yaitu sebesar 1.108 Ha. Untuk lahan bukan sawah dibedakan menjadi pekarangan, tegal/kebun, Hutan dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk pekarangan sebesar 1.592,83 Ha, tegal/kebun sebesar 2.553,74 Ha, hutan sebesar 8.199,31 Ha dan lain-lain sebesar 5.622,75 Ha. Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji lebih luas dibandingkan dengan kecamatan Junrejo.

Hutan di wilayah Kota Batu sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit dan terjal. Luas hutan di Kecamatan Bumiaji paling luas yaitu 6.682,30 Ha. Penggunaan lahan di Kecamatan Batu didominasi untuk pekarangan dan bangunan yaitu seluas 2.077,25 Ha. Hal ini terjadi karena Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan dan aktivitas Kota.

### **c. Potensi Pengembangan Wilayah**

Pada dasarnya Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendatangkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Potensi itu meliputi pengembangan wisata, hasil pertanian dan air bersih. Terkait dengan potensi wilayah, dalam struktur perekonomian Kota Batu, sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati ranking tertinggi sebagai penopang laju pertumbuhan PDRB ADHB, yakni mencapai sebesar 49,32 %. Kondisi tersebut sesuai dengan ikon Kota Batu yang menempatkan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor wisata mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB.

Pada umumnya struktur tanah Kota Batu merupakan lahan subur untuk pertanian. Sektor pertanian dengan sub-sistem perikanan dan peternakan dijadikan salah satu potensi unggulan pembangunan daerah Kota Batu. Produksi pertanian yang berpotensi antara lain tanaman sayur, tanaman padi dan palawija, buah, budidaya semi insentif perikanan, peternakan sapi perah dan kelinci. Salah satu potensi di bidang pertanian yang menjadikan Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman hortikultura, yang meliputi beragam jenis sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.

Secara alamiah dan dengan sendirinya Kota Batu sudah terbentuk citra sebagai kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Potensi daerah di bidang wisata dan pertanian menjadi komoditi andalan

yang kompetitif. Sektor agrowisata atau wisata pertanian merupakan salah satu pilihan untuk dikembangkan di Kota Batu dengan memanfaatkan potensi pertanian dan potensi wisata yang ada. Di samping itu, pariwisata merupakan salah satu potensi Kota Batu selain pertanian, Industri ini meliputi penginapan dan sarana akomodasi lainnya. Pemerintah Kota Batu terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan potensi pariwisata karena wilayah ini telah dikenal baik di tingkat regional maupun nasional.

#### **d. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana erosi/longsor di Kota Batu terdapat pada:

a) Kota Batu bagian utara

Kawasan Gunung Pusungkutuk, Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasmoro, Gunung Raung, dan Sumber Brantas di Desa Tulungrejo, pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut untuk hutan, ruang terbuka hijau, pertanian, pariwisata, permukiman, industri dan pergudangan. Kawasan ini memiliki klasifikasi kelerengan > 40%.

b) Kota Batu bagian selatan

1. Kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punuksapi, dan Gunung Srandil di Desa Oro-oro Ombo, pemanfaatan ruang kawasan tersebut adalah untuk hutan dan pertanian.
2. Kawasan Gunung Wukir di Desa Torongrejo dengan pemanfaatan ruang untuk pertanian, sebagian kecil Desa

Mojorejo dengan pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil Desa Pendem dengan pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil Desa Beji dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman; sebagian kecil Kelurahan Temas dengan pemanfaatan untuk pertanian, ruang terbuka hijau dan permukiman; sebagian kecil Desa Giripurno dengan pemanfaatan untuk pertanian; dan sebagian kecil Desa Pandanrejo dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman. Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %.

c) Kota Batu bagian barat

1. Kawasan Gunung Banyak di Desa Gununugsari dengan pemanfaatan untuk pertanian dan permukiman villa.
2. Gunung Kerumbung di Desa Tulungrejo dengan pemanfaatan untuk pertanian
3. Gunung Preteng di Desa Gunungsari dengan pemanfaatan untuk pertanian

Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %.

d) Kota Batu bagian timur

1. Kawasan Gunung Pucung di Desa Bulukerto dengan pemanfaatan untuk pertanian
2. Kawasan Gunung Gede di Desa Bumiaji dengan pemanfaatan untuk pertanian

Kawasan tersebut memiliki klasifikasi kelerengan > 40 %.

**e. Potensi Unggulan Daerah**

Sektor Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungannya yang

kondusif, akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkan potensi pertanian dan sekaligus bisa dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh. Mulai dari hasil produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanaman hias, bunga potong serta hasil produksi buah-buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan yang tak kalah menarik adalah hasil produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk pertanian yang lain.

### **1) Pertanian**

Kawasan stretegis pertanian di Kota Batu meliputi kawasan sentra produksi pertanian sayur mayur (hortikultura) terletak di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, dan sekitarnya, kawasan sentra produksi pertanian bunga di Desa Sidomulyo, Gunungsari, Punten dan sekitarnya, kawasan sentra produksi apel di Kecamatan Bumiaji, dan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan di Desa Pendem dan Torongrejo.

Untuk lebih mengembangkan sektor pertanian, Pemerintah Kota Batu mempunyai komitmen penerapan sistem pertanian organik melalui BATU GOES ORGANIC yang akan diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu. Program tersebut harus dilaksanakan, termasuk pemerintah desa. Kebijakan diambil dengan mensyaratkan setiap desa menyediakan lahan dari kas desa atau tanah kelurahan khusus menanam produk pertanian yang bebas bahan kimia.

Diharapkan hal tersebut akan mampu memberikan *image* bahwa produk pertanian asal Kota Batu lebih aman dikonsumsi karena bebas bahan kimia.

## **2) Perkebunan**

Sektor Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungannya yang kondusif, akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana lebih lanjut secara optimal dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkan potensi pertanian yang ada di Kota Batu dan sekaligus bisa dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh. Mulai dari hasil produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanaman hias, bunga potong serta hasil produksi buah-buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan yang tak kalah menarik adalah hasil produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk pertanian yang lain. Obyek Wisata yang berbasis Pertanian di Kota Batu antara lain:

1. Tanaman Hias di sepanjang Jl. Bukit Berbunga Desa Sidomulyo
2. Pasar Bunga dan STA (Sub Terminal Agribisnis) Desa Sidomulyo
3. Wisata Ikan (kolam dan kuliner) di PBI (Pasar Benih Ikan) Desa Sidomulyo.

4. Wisata Selektta dengan pedagang bunga dan buah apel serta pangan olahan untuk oleh-oleh.
5. Wisata hutan rakyat di Cangar Desa Sumberbrantas.
6. Wisata Bunga Potong (Krisan) di Perusahaan Inggau Laut Desa Tulungrejo.
7. Wisata Bunga Potong (Mawar) di Desa Gunungsari.
8. Wisata petik Apel, Jambu biji dan Strawberi di Kusuma Agrowisata Batu.
9. Wisata Desa Ternak Sapi Perah di Desa Oro-oro Ombo.
10. Desa Wisata, sampai tahun 2013 yaitu: Desa/Kelurahan Temas, Oro-oro Ombo, Sidomulyo, Sumberejo, Bumiaji, Pandanrejo, Giripurno, Bulukerto, Tulungrejo, Gunungsari, Punten, Sumber Brantas, Torongrejo, Beji, dan Tlekung.

### **3) Peternakan**

Pada tahun 2014 populasi semua jenis ternak dan unggas mengalami peningkatan, hanya kerbau yang mengalami penurunan cukup besar yaitu sekitar 70,97 persen. Populasi ternak kecil yang meliputi kambing dan domba masing-masing tercatat sebanyak 4.915 ekor dan 6.034 ekor. Ini menunjukkan populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen, sementara populasi domba meningkat sebesar 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ayam, baik ayam buras maupun ayam petelur cenderung tetap. Begitu pula dengan ayam pedaging yang tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yaitu sebanyak 160.500 ekor. Berikutnya populasi itik dan entog mengalami peningkatan sebesar 28,78 persen sementara kelinci naik 1 persen yaitu dari 32.299 ekor periode

sebelumnya menjadi 32.614 ekor. Meskipun populasi ayam petelur cenderung tetap di tahun 2014 tetapi produksi telur mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 1.320 butir menjadi 28.720 butir.

Peningkatan ini diikuti meningkatnya produksi susu tetapi produksi daging mengalami penurunan. Produksi susu pada tahun 2011 sebesar 10.748 ribu liter menjadi 12.005 ribu liter pada tahun 2013. Sedangkan produksi daging pada tahun 2011 sebesar 2.549 ton menjadi 2.137 ton pada tahun 2012. Ini berarti produksi daging turun sebesar 16,13 persen dan produksi susu meningkat sebesar 11,70 persen dibanding tahun sebelumnya.

#### **4) Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu potensi Kota Batu selain pertanian, Industri ini meliputi penginapan dan sarana akomodasi lainnya. Pemerintah Kota Batu terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan potensi pariwisata karena wilayah ini telah dikenal baik regional maupun nasional. Pada tahun 2014, pemerintah berupaya mengefektifkan potensi 14 obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki hingga saat ini, antara lain: Pemandian selecta; Kusuma Agro Wisata; Jatim Park; Air Panas Cangar; Pemandian Songgoriti; Batu Night Spectacular (BNS); Petik Apel "Makmur Abadi"; Vihara "Dammadhupa Arama"; Museum Satwa; Beji Outbond; Rafting Kaliwatu; Ingu Laut Florist; Kampoeng Kidz; Banyu Brantas Rafting; dan Desa Wisata.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Batu dalam mengemban visi dan misi pengembangan pariwisata berbasis agropolitan tersebut telah membuahkan hasil dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, berkembangnya agrobisnis, serta semakin dikenalnya Kota Batu di dunia internasional. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Batu menerima penghargaan:

1. Penghargaan Stand Pameran terbaik pada Pekan Wisata Nasional di Jogja Expo Center Yogyakarta
2. Juara 1 Tingkat Nasional Cipta Award Kategori "DTW Buatan Yang Dikelola oleh BUMS skala besar"
3. Kota Batu mendapat penghargaan dalam Anugrah Wisata Jatim kategori: "Kota/Kabupaten yang Berprestasi Dalam Kejuaraan/Penghargaan Tingkat Nasional"

## **5) Potensi Lainnya**

Selain berbagai potensi sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan data kajian dari Provinsi Jawa Timur, Kota Batu memiliki potensi cadangan energi alternatif yakni geothermal (panas bumi) yang sampai saat ini belum dapat dikelola mengingat keterbatasan anggaran pembiayaan. Potensi geothermal tersebut antara lain terdapat di Songgoriti sebanyak 25 Mwe dan Cangar sebanyak 100 Mwe.

Potensi lainnya adalah pembuatan bio gas dari bahan organik dan limbah ternak mengingat Kota Batu memiliki ternak sapi yang cukup banyak serta masih memiliki kawasan hutan yang cukup besar serta kawasan agropolitan. Proses Bio Gas bahan organik (seperti kotoran ternak, kotoran manusia,

jerami sekam dan daun-daun hasil sortiran) dimasukkan di gester, lalu terjadi proses petanisasi secara anaerobik untuk menghasilkan energi biogas dan pupuk organik cair/padat.

## **f. Demografi**

### **a) Jumlah Penduduk**

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun, jumlah Penduduk Kota Batu, pada tahun 2014 tercatat sebesar 210.109 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.055 orang/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,43 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,57 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,75 persen.

Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk adalah 0,75% per tahun yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan laporan sensus penduduk tahun 2010 dengan selang waktu yang berbeda (10 tahun). Hal ini menunjukkan trend yang positif karena perkembangan penduduk lebih terkendali. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk perempuan di Kota Batu selama 5 tahun terakhir yakni 2008-2013 lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yakni masing-masing sebesar 0,64% p.a dan 0,85% p.a. Sebaran penduduk Kota Batu terpusat terutama di Kecamatan Batu yakni 46,26%, Kecamatan Bumiaji 29,24%, dan Kecamatan Junrejo sebesar 24,50%.

## **b) Ketenagakerjaan**

Lapangan pekerjaan di Kota Batu umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08%, pada sektor pertanian 20,66%, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54%.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD.**

Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Upaya pemerintah kota dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi :

*"Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa"*

sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017 serta **"Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani"** yang merupakan visi jangka panjang Kota Batu sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Batu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2007-2012. IKU Pemerintah Kota Batu merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kota Batu. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada *stakeholder* sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Batu dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Pemerintah Kota Batu. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan

gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kota Batu dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang ditetapkan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 serta dengan mengakomodasikan keinginan para *stakeholder*.

#### **a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Batu**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Batu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/ 09/ M.MENPAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah menetapkan *key performance indicator* sebanyak 53 (limapuluh tiga) Indikator Kinerja Utama (53 IKU), dimana 4 IKU diturunkan dari dan/atau mengikuti IKU provinsi Jawa Timur sedangkan 5 IKU merupakan IKU spesifik Kota Batu, yang rinciannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017.

Selain itu, Pemerintah Kota Batu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Batu. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Batu juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Batu tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Batu Tahun 2014**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	rata-rata	75.00	70.10	93.47
2	Jumlah paket pengembangan kawasan organik.	paket	6.00	6.00	100.00
3	Cakupan upaya pemasaran hasil produksi pertanian	Paket	2.00	2.00	100.00
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80.00	82.25	102.81
5	Luas lahan kritis	ha	25.00	24.50	98.00
6	Luas hutan	ha	11,500.00	11,071.20	96.27
7	Jumlah obyek wisata unggulan berbasis budaya lokal dan agrowisata.	Unit	14.00	14.00	100.00
8	Keterpenuhan standar kepariwisataan internasional.	Hotel bintang	11.00	11.00	100.00
9	Jumlah kunjungan wisata.	ribuan org	2862.77	3834.12	133.93
10	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer	%	4.99	4.39	88.10
11	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder	%	9.59	9.64	100.44
12	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier	%	8.79	8.83	100.42
13	Pertumbuhan nilai Investasi	%	12.50	15.61	124.88
14	Tambahkan Investasi	APBD (Rp.jt)	185017.30	167733.93	90.66
		Swasta (Rp.jt)	265538.91	326424.49	122.93
15	Angka melek huruf	%	100.00	98.40	98.40

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

16	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.70	8.82	101.38
17	rata-rata APK SD	%	108.27	108.77	100.46
	rata-rata APK SMP	%	117.72	118.22	100.42
	rata-rata APK SMA/SMK	%	78.65	79.16	100.65
18	rata-rata APM SD	%	95.78	99.74	104.13
	rata-rata APM SMP	%	82.10	97.68	118.98
	rata-rata APM SMA/SMK	%	63.10	66.95	106.10
19	Angka harapan Hidup	tahun	70.01	70.61	100.86
20	Angka Kematian bayi	per 1000 kelahiran	28.10	26.25	93.42
21	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.22	1.17	95.90
22	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	%	81.00	79.76	98.47
23	Ketersediaan air baku	%	60.00	79.37	132.28
24	Ketersediaan irigasi pertanian rakyat		70.00	100.00	142.86
25	Kondisi sarana dan prasarana perhubungan baik	%	74.36	71.37	95.98
26	Jalan dalam kondisi baik	km	36.51	38.00	104.08
		%	46.93	48.84	104.08
27	Media massa	x/th	12.00	8.00	66.67
28	Media Website (Media On Line)	hari/th	365.00	365.00	100.00
29	Kondisi sarana dan prasarana permukiman baik	%	37.00	40.00	108.11
30	Kondisi sarana dan prasarana perekonomian baik	%	30.00	25.00	83.33
31	Kondisi sarana dan prasarana kesehatan baik	%	64.00	60.00	93.75
32	Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan baik	%	50.00	40.00	80.00
33	Pengujian Sumber Mata Air	%	19.28	15.42	80.00
34	Penegakan hukum lingkungan	kasus	5.00	6.00	120.00
35	Energi terbarukan terbangun	Buah	23.00	20.00	86.96
36	Rasio ketersediaan daya listrik	%	78.00	77.00	98.72
37	Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	orang	272.00	272.00	100.00
38	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa	%	75.00	70.00	93.33
39	Menurunnya konflik di masyarakat	kasus	50.00	31.00	62.00
40	Angka kriminalitas	kasus	331.00	256.00	77.34
41	Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	Kominda	7.00	6.00	85.71
42	Jumlah kader parpol yang mendapat pendidikan politik.	pembinaan parpol	2.00	1.00	50.00
		orang	150.00	136.00	90.67

43	Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak	%	100.00	95.77	95.77
44	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	%	100.00	100.00	100.00
45	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota)	%	78.00	79.00	101.28
46	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	%	75.00	100.00	133.33
47	Penduduk bekerja dari angka kerja	%	95.68	97.83	102.25
48	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.32	2.17	50.23
49	Angka kemiskinan	%	4.75	3.83	80.63
50	PDRB per kapita	ribuan Rp	7500.00	9234.97	123.13
51	Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS	lembaga	12.00	12.00	100.00
52	Penurunan jumlah PMKS	%	6.60	6.50	98.48
53	Jumlah Koperasi	unit	180.00	178.00	98.89
54	Persentase koperasi aktif	%	73.56	70.22	95.47
55	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	unit	14,579	14,587	100.05
56	Jumlah BPR/LKM	unit	10.00	10.00	100.00
57	Jumlah peningkatan industri kecil menjadi industri menengah.	unit	3.00	2.00	66.67
58	Jumlah KUB yang mendapat pembinaan iptek sistem produksi.	KUB	22.00	23.00	104.55

Sumber: Hasil Analisis, 2015

## b. Capaian Indikator Kinerja Makro

Tujuan pembangunan Kota Batu telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Batu disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Hasil pengukuran atas indikator kinerja makro Pemerintah Kota Batu tahun 2014 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Batu Tahun 2014**

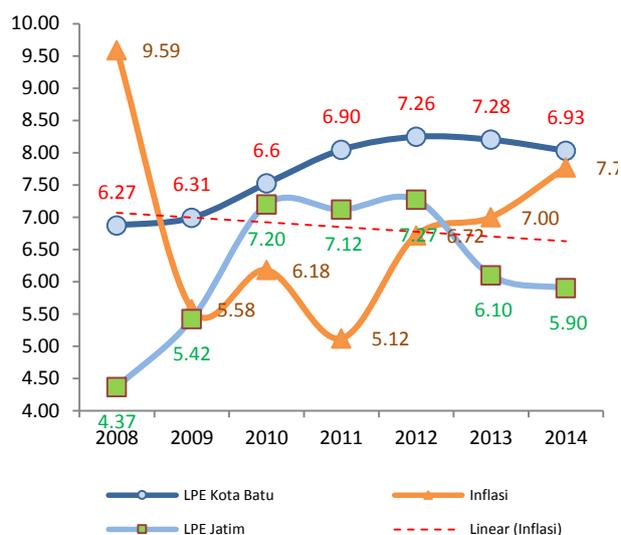
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	Capaian Kinerja (%)	
1	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>						
	Pertumbuhan Ekonomi	%	8.25	8.20	8.03	100.12	
	PDRB atas dasar harga konstan	Rp.Juta	1,674,982.52	1,809,253.00	1,954,594.00	100.01	
	PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.Juta	4,185,987.61	4,994,810.71	5,786,520.00	107.25	
2	<b>Share PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha</b>						
	Pertanian	%	17.68	17.07	16.59	99.19	
	Pertambangan dan penggalian	%	0.20	0.20	0.19	101.68	
	Industri pengolahan	%	6.49	6.24	6.07	98.25	
	Listrik, gas dan air bersih	%	1.37	1.37	1.34	100.34	
	Bangunan	%	2.13	2.70	2.57	107.25	
	Perdagangan, hotel dan restoran	%	49.28	48.44	48.94	98.82	
	Pengangkutan dan komunikasi	%	3.32	3.32	3.26	100.30	
	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	%	3.94	3.85	3.79	98.19	
	Jasa-jasa	%	15.82	16.81	17.23	103.53	
	3	<b>Pendapatan Perkapita</b>	Rp	8,606.18	9,189.39	9,234.97	123.13
	4	<b>Pertumbuhan Investasi</b>	%	15.63	17.04	15.61	124.88
ICOR		point	3.51	3.25	3.40	91.18	
	Tambahkan Investasi	APBD (Rp jt)	201,507.03	199,862.29	167,733.93	103.93	
		Swasta (Rp jt)	246,352.27	236,517.70	326,424.49	93.60	
5	<b>Koperasi dan UKM</b>						

	Jumlah Koperasi	unit	171	178	178	98.89
	Persentase koperasi aktif	%	72.10	72.82	70.22	95.47
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	unit	14,289	14,433	14,579	100.00
	Jumlah BPR/LKM	unit	10.00	10.00	10.00	100.00
<b>6</b>	<b>Sosial Budaya</b>					
	Penduduk:					
	- Jumlah penduduk	Orang	193,023	194,462	196,885	98.97
	- Laju pertumbuhan penduduk	%	0.7	0.75	1.17	104.27
	Penduduk bekerja dari angka kerja	%	96.69	97.68	97.83	102.25
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.41	2.32	2.17	50.23
	Angka kemiskinan	%	5.10	4.42	3.83	80.63
	PDRB per kapita	ribuan Rp	8,606.18	9,189.39	9,234.97	123.13
	Angka harapan hidup	Tahun	70.00	70.32	70.61	100.86
	Indeks Daya Beli	Point	66.73	67.69	67.63	101.03
	Indeks pembangunan manusia	Point	75.42	76.09	76.34	100.76

Sumber: Hasil Analisis, 2015

### 1) Persentase Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan

Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2008-2014 secara umum terus meningkat dari Enam koma Duapuluh tujuh (6,27) Persen tahun 2008 menjadi sebesar enam koma Sembilan Tiga (6,93) Persen pada tahun 2014 (Tabel 2.3) Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan RPJMD pada tahun yang berkenaan yakni 7,28% (Gambar 2.1).



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2015

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

**Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kota Batu Tahun 2008-2014**

Secara umum pada tahun 2014 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional termasuk di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 telah terjadi gejala ekonomi makro yang ditandai dengan memanasnya mesin ekonomi yang berakibat terjadinya defisit neraca pembayaran nasional, kenaikan kurs mata uang kuat seperti US Dollar dan lain-lain, gejala inflasi yang cukup tinggi, kenaikan harga BBM. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM sejak 18 November 2014. Selain itu masih dirasakan dampak lanjutan kenaikan bahan bakar rumah tangga (LPG 12kg) dan penyesuaian tarif listrik tahap ke-3, serta tingginya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Tambahan lagi adalah terjadinya peningkatan harga emas sebagai salah satu instrumen investasi yang dinilai aman (*safe haven*) ditengah kondisi

perekonomian yang masih belum kondusif serta minimnya produksi pertanian karena belum memasuki musim panen. Hal ini memicu tingginya laju inflasi di Kota Batu dan Jawa Timur pada umumnya.

Di sisi lain, perlambatan konsumsi pemerintah didorong adanya program efisiensi di lingkungan instansi pemerintah. Meskipun kinerja sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi mengalami peningkatan, namun Kota Batu tidak terlalu merasakan dampaknya. Bahkan perlambatan kinerja masih terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan andalan Kota Batu sebagai dampak pergeseran masa tanam sehingga pada tahun 2014 sektor ini belum memasuki musim panen. Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sekitar sentra produksi di daerah sekitar Kota Batu menyebabkan terjadinya gagal panen dan menurunkan produktivitas di sektor ini. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum turut menunjukkan perlambatan dipengaruhi program penghematan pemerintah yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel, padahal kontribusi kegiatan semacam ini mencapai angka 60% terhadap tingkat hunian hotel di Jawa Timur dan Kota Batu pada khususnya. Di Kota Batu, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selama tahun 2014 masih menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun terjadi perlambatan masing-masing dari 10,09% dan 10,55% pada tahun 2013 menjadi 9,71% dan 9,47% pada tahun 2014.

**Tabel 2.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2014**

No.	Keterangan	2012	2013	2014
1	Kota Batu (%)	7.26	7.28	6.93
2	Jawa Timur (%)	6.12	6.60	5.90
3	Nasional (%)	6.55	5.60	5.10

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Batu tersebut secara umum masih tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2014 seperti terlihat pada tabel 2.3.

Ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan signifikan, pada tahun 2014 mencapai sebesar Lima Trilyun Enamratus Sembilanpuluh Enam Milyar Rupiah (Rp.5,696 Milyar) dengan proyeksi kenaikan sebesar Delapanratus Delapanpuluh Dua koma Nol Delapan Milyar Rupiah (Rp.882,08 Milyar) atau meningkat sebesar 17,83 persen dari tahun 2013.

Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Batu Tahun 2014 mencapai Satu Trilyun Sembilanratus Limapuluh Delapan Milyar Rupiah (Rp.1,958 Milyar) dengan kenaikan sebesar Seratus Empatpuluh Lima koma Empatpuluh Delapan Milyar Rupiah (Rp.145,48 Milyar) dengan laju kenaikan sebesar 8,03 persen dibandingkan tahun 2013.

Selain itu, dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang merupakan sektor-sektor strategis dan potensial di Kota Batu, nampak bahwa kontribusi pertumbuhan sektor PDRB mengalami perubahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Batu ini terutama didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel

dan Restoran yang tumbuh sebesar 9,45 Persen, sektor Jasa-jasa 7,97 Persen, dan sektor Keuangan 8,74 Persen. Khusus sub sektor Pariwisata juga mencatat perkembangan (meskipun laju pertumbuhannya mengalami penurunan / perlambatan) di tahun 2014 di mana kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara meningkat dari 2.547.855 orang tahun 2012 menjadi 3.292.298 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 29,20 Persen. Pada tahun 2014 kunjungan wisatawan mencapai 3.834.121 orang atau tumbuh 16,46 persen.

Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2014 sebesar 8,03 Persen ini telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2014 dalam dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 yaitu 8,02 Persen.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi:**

Di Kota Batu, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang merupakan share terbesar PDRB, selama tahun 2014 masih menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun terjadi perlambatan.

### **Hambatan / masalah:**

- Terjadinya pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM dampak lanjutan kenaikan bahan bakar rumah tangga (LPG 12 kg) dan penyesuaian tarif listrik tahap ke-3.

- Diterapkannya program penghematan pemerintah yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel, padahal kontribusi kegiatan semacam ini mencapai angka 60% terhadap tingkat hunian hotel di Jawa Timur dan Kota Batu pada khususnya.

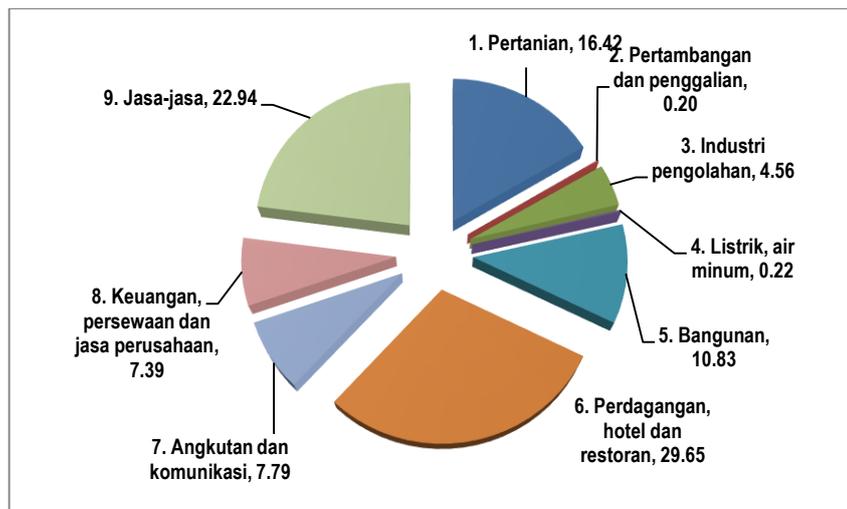
**Strategi / upaya pemecahan:**

- Penerapan program penguatan ekonomi khususnya sektor koperasi dan UMKM utamanya terkait dengan sektor primer.
- Menghimbau Pemerintah Pusat untuk mereview dan meninjau kembali kebijakan efisiensi yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel
- Melakukan koordinasi dengan sektor terkait perhotelan dan pariwisata untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya.
- Melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengantisipasi penurunan pajak daerah sektor Hotel dan Restoran serta Hiburan.

**2) *Share* PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha**

Dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang merupakan sektor-sektor strategis dan potensial di Kota Batu, nampak bahwa kontribusi pertumbuhan sektor PDRB mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu ini, sampai dengan tahun 2014 terutama didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh secara kumulatif sebesar 9,45%, sektor Jasa-jasa 7,97%, dan sektor Keuangan 8,75%. Khusus sub sektor Pariwisata juga masih

mencatat perkembangan di tahun 2013 meskipun laju pertumbuhannya melambat di mana kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara maningkat dari 2.547.855 orang tahun 2012 menjadi 3.292.298 orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 29,20% dan menjadi 3.834.121 orang pada tahun 2014 atau meningkat 16,46%.



Sampai dengan tahun 2014, di dalam struktur perekonomian Kota Batu, sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati rangking tertinggi penopang laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku, yakni mencapai sebesar 45,02 %. Kondisi tersebut sesuai dengan ikon Kota Batu yang menempatkan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor wisata mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB.

**Tabel 2.4 Distribusi (*Share*) PDRB di Kota Batu**

SEKTOR	2012	2013*)	2014**)
1. Pertanian	17.68	17.30	16.73
2. Pertambangan dan Penggalian	0.20	0.19	0.19
3. Industri Pengolahan	6.25	6.18	6.06
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1.37	1.34	1.34
5. Bangunan	2.13	2.24	2.40
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	49.28	50.06	49.53
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.32	3.27	3.25
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.94	4.01	3.86
9. Jasa-jasa	15.82	15.41	16.64
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2014-Data diolah.

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa berdasarkan struktur perekonomian, maka perubahan pangsa terhadap PDRB Kota Batu terlihat sampai tahun 2014, pangsa sektor tersier terus meningkat. Pada tahun 2009, pangsa sektor tersier masih mencapai 70,91 persen dan secara konsisten naik hingga mencapai 72,37 persen pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 72,74 persen. Pada tahun 2014 sektor tersier mencapai 73,28 persen. Sementara itu, pangsa sektor sekunder yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Batu bersama sektor tersier, memberi sumbangan 9,75 persen pada tahun 2012 naik menjadi 9.77 tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 9.80. Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor sekunder mengalami penurunan seiring bertambahnya sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya sektor sekunder masih lebih cepat sektor tersier. Peningkatan sektor sekunder terjadi karena pangsa sektor listrik dan air bersih serta pangsa sektor bangunan yang meningkat selama empat tahun terakhir, walaupun pangsa sektor industri pengolahan

mengalami penurunan.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antar sektor ekonomi**

Sektor sekunder dan tersier semakin berkembang seiring maraknya pencaangan Kota Batu sebagai Kota Kepariwisata Internasional serta Jasa-jasa mendukungnya.

#### **Hambatan / masalah:**

- Semakin menurunnya pangsa sektor pertanian secara runtut waktu.
- Terjadinya gap skill tenaga kerja yang bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier.

#### **Strategi / upaya pemecahan:**

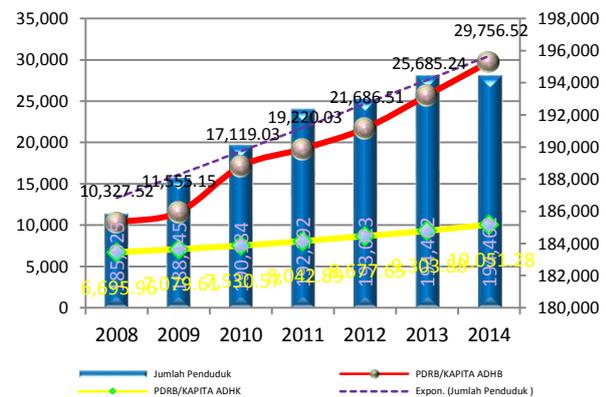
- Upaya peningkatan nilai tambah di sektor pertanian melalui penerapan pertanian dan diversifikasi produk pertanian organik.
- Pelaksanaan program Pendidikan Vokasi di sektor pertanian dan pariwisata untuk menyiapkan SDM yang siap pakai.

### **3) PDRB per kapita ADHK**

Secara agregat perkembangan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat mencerminkan perkembangan / peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu selama tahun 2008-2014. Pendapatan per kapita penduduk Kota Batu baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan secara berkelanjutan selama periode tersebut.

Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2012 mencapai Rp.21,51 Juta meningkat Rp.2,29 juta per kapita dibandingkan tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp. 19,22 Juta atau naik 11,90 Persen. Pada tahun 2013 PDRB per Kapita meningkat menjadi Rp.25,37 juta meningkat sebesar Rp. 3,86 juta atau 17,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 nilai PDRB per Kapita naik lagi menjadi Rp.27,34 juta.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan per Kapita Kota Batu Tahun 2008-2014



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2015 dan Hasil analisis 2015

\*) Hasil Provekisi dan merunankan Anaka sementara

Sedangkan jumlah PDRB per Kapita ADHK tahun 2013 mencapai Rp.9,17 Juta meningkat 6,53 Persen atau Rp.561,96 ribu per kapita dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 8,61 Juta. Pada tahun 2014 nilai PDRB per Kapita ADHK mencapai Rp.9,23 juta atau meningkat 0,50% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun ini terasa kurang signifikan mengingat terjadinya inflasi yang cukup tinggi khususnya di wilayah Malang Raya.

Meskipun kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian kinerja PDRB per kapita ADHK tahun 2014 sebesar Rp.9.23 juta belum mencapai titik yang optimal sebagaimana diharapkan khususnya dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota Lain di Jawa Timur. Namun demikian,

capaian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK telah mencapai nilai varian target RPJMD yang ditetapkan tahun 2014 sebesar Rp.7.500.000,00. Dengan capaian kinerja 123,13 Persen.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian PDRB/Kapita**

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batu cukup tinggi yang diiringi dengan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

**Hambatan / masalah:**

- Laju pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata sehingga masih terjadi gap distribusi pendapatan.
- Daya serap LPE yang tinggi terhadap tenaga kerja dan penurunan kemiskinan dirasa belum optimal.

**Strategi / upaya pemecahan:**

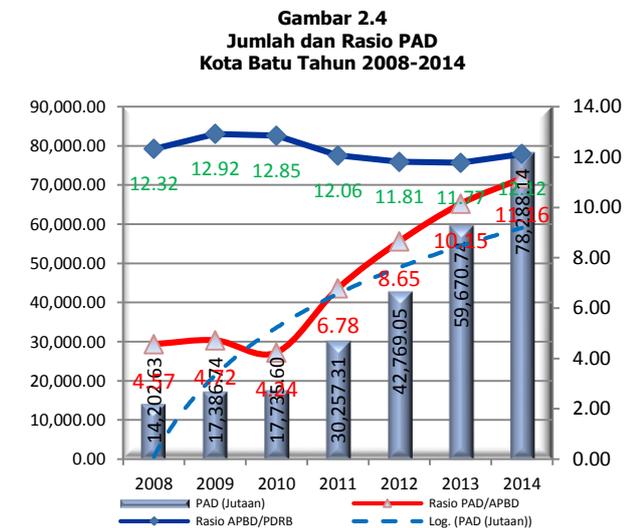
- Mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diikuti distribusi pendapatan yang lebih baik.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor bisnis yang padat karya dan ramah lingkungan.

#### 4) Jumlah PAD

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu antar waktu terus meningkat secara berkelanjutan mulai Rp.14,202,630,312.49 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.38,794,059,670.38 pada tahun 2012 dan mencapai Rp. 59,670,741,826.29 pada tahun 2013 dan mencapai Rp. 78,288,135,526.04 pada tahun 2014 (Gambar 2.4). Pada tahun 2013 PAD mengalami peningkatan meskipun percepatannya sedikit mengalami perlambatan mencapai Rp.16,901,693,221.01 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 18,617,393,699.75. Dengan target PAD tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.49.000.000.000,00 maka capaian kinerja PAD pada tahun ini adalah 159,77 persen.

Berkorelasi dengan hal itu, maka Rasio kontribusi PAD terhadap APBD mengalami kenaikan pula dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 8,65 pada tahun 2012 menjadi 10,15 pada tahun

2013 dan tahun 2014 meningkat lagi menjadi 11,16. Jadi peran dan kontribusi PAD terhadap APBD Kota



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2015

Batu terus mengalami peningkatan. Selain itu, hal ini mengindikasikan mulai berjalannya upaya intensifikasi

maupun ekstensifikasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Batu. Di sisi lain rasio APBD terhadap PDRB juga menunjukkan adanya perbaikan yakni dari 11,81 tahun 2012 kemudian sedikit menurun menjadi 11,57 tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 12,12 pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan yang ditopang dengan APBD relatif semakin berkurang/mengecil dan membaik serta sebaliknya peran masyarakat di dalam pembiayaan pembangunan semakin meningkat.

Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.59,670,741,826.29 atau meningkat sebesar 39,52% senilai Rp.16,901,693,221.01 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 42,769,048,605.28. Pada tahun 2014 target PAD sebesar Rp.49 Milyar dapat dilampaui dengan realisasi Rp.78,29 Milyar atau terlampaui sebesar 59,77%. Sebagaimana dikemukakan di atas peningkatan ini ditopang oleh membaiknya kinerja beberapa pos Pendapatan Asli Daerah dan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang kondusif selama tahun anggaran 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian PAD tersebut telah melampaui varian target yang ditetapkan di dalam RPJMD.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian PAD:**

- Potensi PAD Kota Batu masih terus berkembang terutama dari sektor Pajak Hotel, Restoran, dan Pajak Hiburan.

- Sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang selama ini selalu mendominasi mulai dapat tergeser oleh Pajak Daerah yang lain yang semakin aktif.
- Pemerintah Kota Batu c/q. Dinas Pendapatan Daerah selalu pro aktif melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

**Hambatan / masalah:**

- Meskipun secara kuantitatif PAD Kota Batu terus meningkat namun tingkat efektifitasnya secara kualitatif melambat.
- Belum optimalnya Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya yang terkait dengan penetapan tarif pajak dan retribusi.

**Strategi / upaya pemecahan:**

- Lebih menggiatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
- Menerapkan penerapan sistem PAD on line untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pemantauan PAD.
- Melakukan review dan kajian terhadap Perda yang terkait dengan PAD agar lebih kompetitif sekaligus mampu merangsang perbaikan iklim investasi Kota Batu.

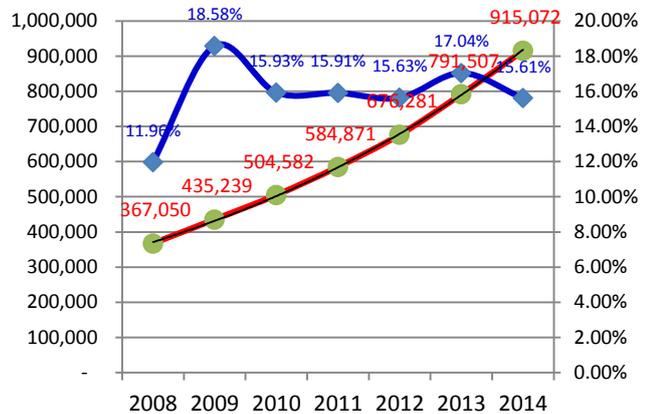
**5) Investasi**

Indikator investasi menggambarkan besarnya nilai investasi dan jumlah investor yang masuk di Kota Batu. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan semakin meningkat pula kondisi perekonomian. Laju pertumbuhan investasi di Kota Batu dari tahun ke tahun selama lima tahun

terakhir yakni tahun 2008-2014 terus mengalami peningkatan meskipun sedikit berfluktuasi yang berkorelasi dengan perkembangan terkini kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Jawa Timur. Laju pertumbuhan investasi antar waktu sejak tahun 2008-2014 mencapai rata-rata 16,61 Persen per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan investasi mencapai 16.46 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan investasi di Kota Batu mengalami perlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor makro ekonomi. Survey Bank Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM serta penyesuaian tarif dasar listrik di triwulan IV tahun 2014 tidak terlalu mempengaruhi rencana investasi untuk perusahaan skala besar dan menengah. Tetapi kebijakan tersebut ternyata berpengaruh negatif terhadap perusahaan skala kecil. Sentimen negatif yang berlangsung sejak triwulan III 2014 akibat adanya rencana kenaikan UMK Kabupaten/Kota di tahun 2015 terindikasi mempengaruhi laju investasi.

Pada tahun 2014 pertumbuhan investasi diproyeksikan mencapai 16.46 Persen dan telah mencapai nilai varian target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun yang berkenaan sebesar 14,29% p.a.

**Gambar 2.5**  
**Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi**  
**Kota Batu Tahun 2008-2014**



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran**

Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk terus menjaga dan terus memperbaiki iklim investasi.

### **Hambatan/masalah:**

- Pertumbuhan investasi di Kota Batu mengalami perlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor makro ekonomi antara lain: kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif dasar listrik yang berpengaruh negatif terhadap perusahaan skala kecil.
- Adanya sentimen negatif akibat adanya rencana kenaikan UMK Kabupaten/Kota di tahun 2015.

- Belum tersusunnya sistem informasi sumber daya dan potensi unggulan daerah.
- Belum tersusunnya peta penanaman modal daerah.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

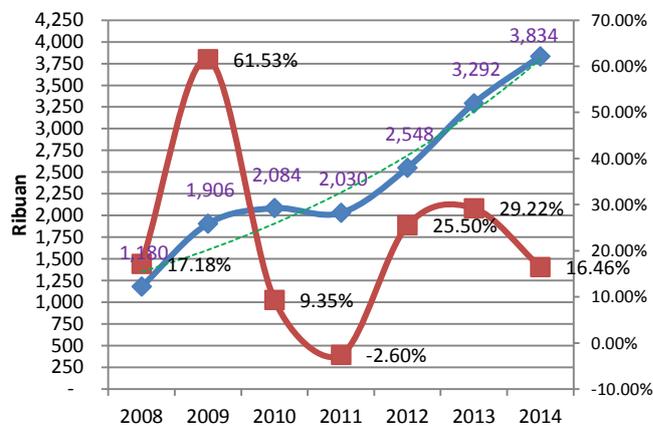
- Menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan kompetitif
- Menjaga dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada
- Malakukan promosi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan swasta dari dalam dan luar negeri
- Peningkatan masuknya Investasi melalui kemudahan, ketepatan waktu dan transparansi pelayanan perijinan.
- Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi.
- Peningkatan promosi produk unggulan daerah dan kerjasama investasi.

**6) Kunjungan Wisatawan**

Meskipun ditandai dengan laju pertumbuhan yang melambat, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada tahun 2014 masih menunjukkan kinerja yang baik. Pariwisata merupakan kebutuhan tersier yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan yang lebih urgen terlaksana. Pada tahun 2014 persepsi masyarakat konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini didorong oleh memburuknya tingkat penghasilan riil yang dirasakan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, dan ketepatan waktu untuk membeli barang tahan lama maupun pemenuhan

kebutuhan tersier seperti pariwisata. Indikasi lainnya adalah melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) utamanya pada rekening tabungan dan deposito menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat saat ini digunakan untuk memenuhi konsumsi (kebutuhan primer).

**Gambar 2.6**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kota Batu Tahun 2008-2014**



Pada tahun 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mencatat kunjungan wisatawan sebesar 2.547.855 wisatawan baik domestik maupun manca negara atau meningkat 25,5% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 kunjungan wisatawan meningkat kembali menjadi 3.292.298 wisatawan atau meningkat 29,20%. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu mencapai sekitar 3.834.121 orang atau meningkat 16,46% dari tahun sebelumnya. Target jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan dokumen RPJMD adalah sebesar 2.862.770 orang atau tercapai 133.93% dari target yang ditetapkan.

Dengan demikian, Capaian kinerja Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu tahun 2014 telah melampaui target varian RPJMD sebesar 33,93% atau 971.351.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pariwisata:**

Pemerintah Kota Batu memiliki komitmen dan kepedulian tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata.

**Hambatan / masalah:**

- Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi.
- Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat untuk siap menjadi manusia pariwisata.
- Kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat terhadap perkembangan pariwisata

**Strategi / upaya pemecahan:**

- Peningkatan kapasitas jalan terkait dengan upaya memperlancar arus lalu lintas.
- Peningkatan upaya pembinaan dan pengendalian dalam mempersiapkan masyarakat pariwisata.

- Peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pembinaan terhadap masyarakat dalam menyongsong perkembangan pariwisata.

## **7) Sosial Budaya**

Keberhasilan pembangunan bidang sosial budaya dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara lain: laju pertumbuhan, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, usia harapan hidup, dan IPM. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batu selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tahun 2012 sebesar 0,75%, tahun 2013 sebesar 0,75% dan tahun 2014 sebesar 1,17%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Batu bukan karena pertumbuhan alami tetapi dipengaruhi oleh adanya faktor migrasi penduduk dari luar daerah yang tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 sebesar 3,41%, pada tahun 2013 sebesar 2,32% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 2,17%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada tahun 2014 masih cukup mampu menyerap tenaga kerja. Angka kemiskinan selama tiga tahun terakhir secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2012 sebesar 5,10% menjadi 4,42% tahun 2013 dan menurun menjadi 3,83% tahun 2014. Kondisi tersebut mencerminkan telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga tidak lagi memenuhi 14 kriteria miskin. Hal ini juga tercermin dari angka indeks daya beli yang meningkat secara gradual mulai 66,73 (2012) meningkat menjadi 67,69 (2013) kemudian menurun tipis menjadi 67,63

(2014). Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Batu mencapai 76,34 tahun, lebih tinggi bila dibandingkan UHH tingkat propinsi Jawa Timur 74 tahun ataupun tingkat nasional 70,60 tahun.

### **8) Indeks Daya Beli (IDB/PPP)**

Kemampuan daya beli penduduk Kota Batu mengalami peningkatan secara stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Indeks PPP Kota Batu dari tahun 2008 sampai tahun 2013 meningkat secara gradual dari 63,79 pada tahun 2008 menjadi 64,65 pada tahun 2009 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 64,88 pada tahun 2010. Peningkatan tersebut terus berlanjut sehingga tahun 2011 menjadi 65,80, tahun 2012 naik menjadi 66,46 dan tahun 2013 menjadi 67,69. Namun demikian tahun 2014 Indeks Daya Beli penduduk Kota Batu sedikit mengalami penurunan menjadi 67,63 point. Faktor ekonomi makro banyak berpengaruh terhadap turunnya daya beli tersebut tidak hanya bagi masyarakat Kota Batu tetapi juga masyarakat Jawa Timur dan Nasional.

Pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman non beralkohol meningkat pada triwulan IV tahun 2014 yakni dari 2,9% menjadi 3,7% namun pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu dalam. Penurunan ini diikuti oleh turunnya pertumbuhan konsumsi transportasi dan angkutan serta konsumsi restoran dan hotel. Selain itu faktor kebijakan efisiensi dengan melarang rapat di luar kantor bagi instansi

pemerintah diyakini juga turut mempengaruhi perlambatan konsumsi dan daya beli masyarakat.

Target IDB Kota Batu pada tahun 2014 adalah 66,94 point. Capaian kinerja Indeks Daya Beli (IDB) Kota Batu tahun 2014 sebesar 67,63 point, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa IDB Kota Batu masih mampu mencapai nilai varian target yang ditetapkan tahun 2014.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IDB**

Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Batu seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

#### **Hambatan / masalah:**

- Persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang didorong oleh memburuknya tingkat penghasilan riil, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, dan ketepatan waktu untuk membeli barang tahan lama maupun pemenuhan kebutuhan tersier.
- Laju inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini.

#### **Strategi / upaya pemecahan:**

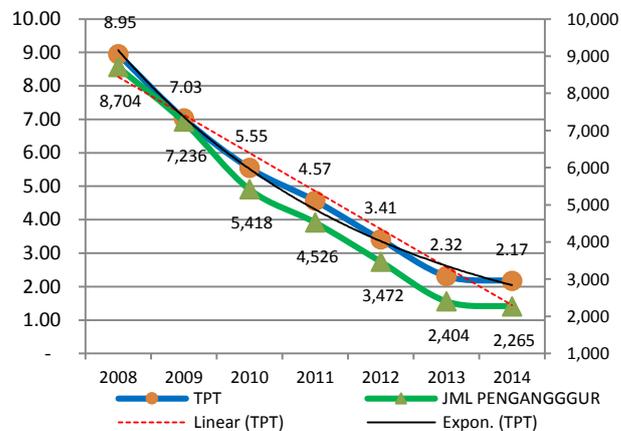
Upaya lebih menyeimbangkan distribusi pendapatan masyarakat dengan memperkecil disparitas pendapatan.

### **9) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah angkatan

kerja di Kota Batu sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.013 orang (tahun 2012, jumlah angkatan kerja 101.733 orang). Sedangkan jumlah orang yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 3.078 orang, sehingga angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin, yaitu dari 3,41 persen pada tahun 2012 menjadi 2,32 persen pada tahun 2013. Angka TPT di Kota Batu sebesar 2,32 persen tersebut telah melampaui target tahun berkenaan yakni 4,45% dan lebih kecil dibandingkan angka TPT Jawa Timur yaitu sebesar 4,33 persen. Pada tahun 2014 angka TPT terus menurun sehingga mencapai 2,17% dengan jumlah 2.265 orang.

**Gambar 2.7**  
**Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kota Batu Tahun 2008-2014**



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2014 dan Hasil analisis 2015

Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) di Kota Batu sebanyak 147.011 orang, yang terdiri dari angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan penganggur) sebesar 104.267 orang dan bukan angkatan kerja (penduduk yang masuk kategori

bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 43.268 orang. Dari 104.267 angkatan kerja di Kota Batu, sebanyak 102.002 orang terserap dalam lapangan pekerjaan, sedangkan sisanya 2.265 orang masih menganggur atau belum mempunyai pekerjaan.

Capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batu tahun 2014 tersebut di atas sebesar Dua koma Tujuhbelas Persen (2,17 Persen), menunjukkan bahwa besaran ini telah berhasil melampaui nilai varian target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk Tahun 2014 sebesar 4,32% (Empat koma Tigapuluh Dua Persen).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran**

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari beberapa kebijakan prioritas pembangunan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor

### **Hambatan/masalah:**

Kondisi makro ekonomi pada saat ini kurang mendukung sehingga banyak perusahaan khususnya sektor perhotelan melakukan review profil tenaga kerja mereka.

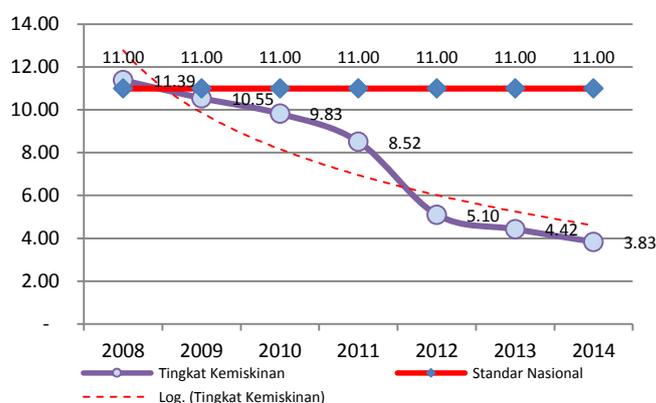
### **Strategi/ upaya pemecahan:**

- Melaksanakan Program Perluasan Lapangan Kerja, Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Pengangguran di Pedesaan maupun Perkotaan, Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat, Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis.

- Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pengembangan UKM, Perluasan Kesempatan Berusaha dan Menumbuhkan Wira Usaha Baru (WUB) serta Peningkatan Daya Saing Industri yang Menyerap Tenaga Kerja.

Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Batu Tahun 2008-2014



Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2014 dan Hasil analisis 2015

\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

## 10) Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan di Kota Batu berada cukup jauh di bawah garis batas nasional yakni mencapai 8,52%. Angka ini menurun lagi secara signifikan tahun berikutnya yakni 2012 yang merupakan akhir periode tahun RPJMD menjadi 5,10%. Tahun 2013 berdasarkan Hasil Survey Lapangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batu pada akhir tahun 2013, angka kemiskinan mencapai 4,42%. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatat angka kemiskinan di Kota Batu berada di bawah 4,0% dan masih

merupakan yang terendah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian jumlah penduduk Kota Batu yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 95,58%. Capaian ini berarti melampaui varian target di dalam RPJMD untuk jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 95% pada periode yang sama.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran**

Adanya dampak kebijakan prioritas program pembangunan, serta implikasi dari perlakuan khusus Pemerintah Kota Batu terhadap komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan.

### **Hambatan/masalah:**

- Belum tersedianya data yang akurat tentang jumlah dan sebaran penduduk miskin dan hampir miskin.
- Rentannya kondisi penduduk hampir miskin terkait dengan ketidakpastian kondisi makro ekonomi.

### **Strategi/ upaya pemecahan:**

- Melakukan survey secara berkala untuk memonitor kondisi masyarakat miskin di Kota Batu
- Pelaksanaan kebijakan prioritas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang meliputi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

### **11) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kota Batu untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.

Pada tahun 2011, IPM Kota Batu mencapai 74,93 kemudian meningkat menjadi 75,42 pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 76,09 dengan *shortfall* sebesar 0,46. Sedangkan *shortfall* pada tahun sebelumnya adalah 0,51. Tahun 2014 angka IPM Kota Batu meningkat tipis mencapai 76,34 point dengan *shortfall* dari tahun sebelumnya sebesar hanya sebesar 0,26. Angka *shortfall* ini merupakan yang terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat dari Tabel 2.5 bahwa kecilnya *shortfall* tersebut disebabkan oleh turunnya angka indeks daya beli masyarakat yang juga mengalami penurunan dari 67,69 tahun 2013 menjadi 67,63 pada tahun 2014.

**Tabel 2.5 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Selama Tahun 2008-2014**

Uraian	2012	2013	2014	2011-2012	2012-2013	2013-2014
IHH	75.00	75.53	75.98	0.47	0.53	0.45
IP	84.52	85.04	85.42	0.07	0.52	0.38
IDB	66.73	67.69	67.63	0.93	0.96	-0.06
<b>IPM</b>	<b>75.42</b>	<b>76.09</b>	<b>76.34</b>	<b>0.49</b>	<b>0.67</b>	<b>0.26</b>
AKB	28.58	28.10	27.13	-0.62	-0.48	-0.97
AHH	70.00	70.32	70.61	0.28	0.32	0.29

Sumber : Indikator Makro BPS Prop. Jatim, diolah, 2014

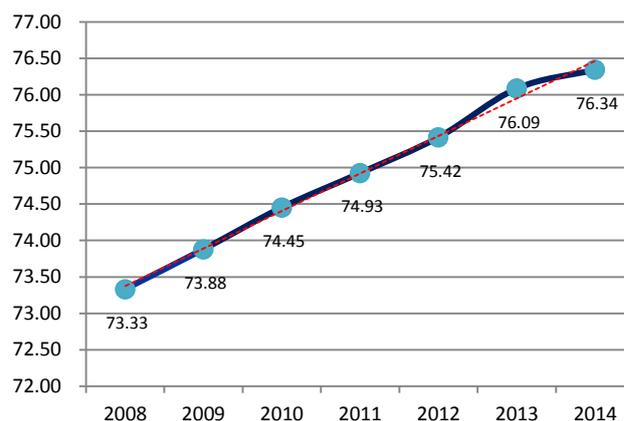
\*) Hasil proyeksi

Hal ini berarti bahwa percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat masih terus meningkat meskipun terjadi perlambatan laju pertumbuhannya karena faktor ekstern yang *uncontrollable* semisal kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga-harga bahan pokok, inflasi, dan sejenisnya. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu: pada tahun 2012 indeks pendidikan 84,99, indeks kesehatan 74,86 dan indeks daya beli 66,46, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 85,42; 75,53, dan 67,69. Tabel 2.5 berikut menyajikan informasi IPM beserta komponennya antar waktu mulai tahun 2008-2013 berikut *shortfall*nya. IPM Kota Batu pada tahun 2014 diperkirakan berada pada peringkat ke-8 – meningkat 1 point dibandingkan peringkat tahun 2013 - di antara 38 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Gambar 2.9 menunjukkan Perkembangan IPM Kota Batu Antar Waktu mulai tahun 2008-2013. Terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut IPM Kota Batu menunjukkan tren/kecenderungan yang meningkat secara gradual dan signifikan serta berkelanjutan (*sustainable*). Capaian kinerja

varian IPM Kota Batu tahun 2014 sebesar 76,34 point tersebut berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD tahun 2014 sebesar 75,77 point.

**Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Antar Waktu Kota Batu Tahun 2008-2014**



Sumber : Indikator Makro BPS Prop. Jatim, diolah, 2014  
\*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran**

Semakin meningkatnya usia harapan hidup, peluang dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat Kota Batu.

### **Hambatan/masalah:**

Terdapatnya kecenderungan penurunan daya beli masyarakat karena relatif kurang kondusifnya kondisi makro ekonomi.

**Strategi/ upaya pemecahan:**

- Meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja baru,
- Memperbaiki mutu pendidikan dan
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**c. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Batu Tahun 2014**

Secara garis besa, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBD Kota Batu tahun 2008, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: kelompok internal dan eksternal. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok internal antara lain proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sistem pengadministrasian anggaran, dan perubahan peraturan pada berbagai jenjang. Perubahan tersebut mengakibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum cukup memahami proses perencanaan, penganggaran dan tata kelola anggaran yang sesuai dengan peraturan perundangan terbaru.

Secara garis besar kinerja APBD Kota Batu tahun 2005-2011 disajikan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Perkembangan Indikator Keuangan Kota Batu Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014
PDRB ADHB (Jutaan)	4,185,987.61	4,994,810.71	5,786,520.00
PDRB ADHK (Jutaan)	1,674,982.52	1,809,253.29	1,954,594.00
PDRB/KAPITA ADHB(Ribuan)	21,507.90	25,369.17	27,339.85
PDRB/KAPITA ADHK(Ribuan)	8,606.18	9,189.39	9,234.97
APBD (Jutaan)	494,329.27	587,991.43	701,474.41
Rasio APBD/PDRB	11.81	11.77	12.12
PAD (Jutaan)	42,769.05	59,670.74	78,288.14
Rasio PAD/APBD	8.65	10.15	11.16

Sumber: Berbagai sumber, 2014 – Data diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa PDRB Kota Batu baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan yang berkelanjutan selama kurun waktu 2009-2014. Peningkatan tersebut disertai dengan kenaikan pendapatan per kapita ADHK masyarakat dalam periode yang sama yakni Rp.7.080 ribu pada tahun 2009 menjadi Rp.9.189 ribu pada tahun 2013 dan naik mencapai Rp.9.235 ribu pada tahun 2014. Pendapatan per kapita ADHB meningkat dari Rp.11.555 ribu pada tahun 2009 menjadi Rp.25.369 ribu pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp.27.340 ribu pada tahun 2014.

Nilai APBD Kota Batu selama periode tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp.368,477.57 juta tahun 2009 menjadi Rp.587.991,43 juta tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai nilai Rp701,474.41 juta. Di sisi lain, kualitas daya ungkit (*leverage*) APBD yang mengindikasikan peran APBD terhadap pembentukan PDRB masih berada pada kisaran 12% namun terus mengalami perbaikan (penurunan) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dari 12,92 tahun 2009 menjadi 11,77 tahun 2013. Akan tetapi tahun 2014 maningkat kembali menjadi 12,12. Hal ini secara kualitatif berarti menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Artinya, elama 5 tahun sebelumnya untuk meningkatkan PDRB, peran APBD semakin menurun/kecil dan peran tersebut secara bertahap beralih dilakukan oleh masyarakat, namun pada tahun 2014 peran tersebut mengalami sedikit penurunan. Di sisi lain rasio PAD terhadap APBD secara kuantitas juga mengalami peningkatan dari 4,72 pada tahun 2009 menjadi 10,15 tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 11,16 tahun 2014. Proporsi PAD yang meningkat

mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan (*financial dependency*) pembangunan dari dana luar (pusat dan provinsi) semakin kecil. Pada tahun 2014 target PAD setelah PAK Kota Batu sebesar Rp.49.000.000.000,00 telah dapat dilampaui sebesar 159,77% dengan perolehan sebesar Rp.78,288,135,526.04. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk selalu memperbaiki iklim investasi serta berupaya terus menarik investasi dan melakukan reformasi birokrasi, review terhadap Perda terkait, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dunia usaha. Kebijakan ini tetap dipertahankan dan akan terus dilakukan perbaikan selama kurun waktu 2012-2017.

### **1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Pada struktur APBD Kota Batu tahun 2013 atau ringkasan perubahan APBD tahun anggaran 2013, pendapatan Kota Batu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun target pendapatan daerah Kota Batu tahun 2013 secara keseluruhan sebesar Rp.678.600.450.633,00 dan terealisasi sebesar Rp.701.474.406.971,04 atau 103,37%. Rincian target dan realisasi pendapatan daerah adalah sebagaimana Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>678,600,450,633.00</b>	<b>701,474,406,971.04</b>	<b>103.37</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	72,269,056,000.00	78,288,135,526.04	108.33
Pendapatan Pajak Daerah	50,000,000,000.00	62,807,445,882.00	125.61
Pendapatan Retribusi Daerah	7,358,965,803.00	5,596,247,852.00	76.05
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,189,729,441.01	2,189,729,441.01	100.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,720,360,755.99	7,694,712,351.03	60.49
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	604,644,817,633.00	607,775,400,048.00	100.52
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	500,746,474,317.00	489,840,348,138.00	97.82
Dana Bagi Hasil Pajak	31,458,245,695.00	25,691,682,579.00	81.67
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	26,558,613,622.00	21,419,050,559.00	80.65
Dana Alokasi Umum	412,378,255,000.00	412,378,255,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	30,351,360,000.00	30,351,360,000.00	100.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53,756,762,800.00	55,665,432,000.00	103.55
Dana Otonomi Khusus	53,756,762,800.00	55,665,432,000.00	103.55
Dana Penyesuaian	0.00	0.00	
Transfer Pemerintah Provinsi	50,141,580,516.00	62,269,619,910.00	124.19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50,141,580,516.00	62,269,619,910.00	124.19
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	1,686,577,000.00	15,410,871,397.00	913.74
Pendapatan Lainnya	1,686,577,000.00	15,410,871,397.00	913.74

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015

Meskipun target telah dapat dicapai namun Pemerintah Kota Batu tetap memandang perlunya dilakukan optimasi dan serangkaian upaya meningkatkan Pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Selama ini perolehan PAD selalu didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang merupakan komponen

pendapatan pajak 'pasif', namun pada tahun 2013 porsi PPJU telah dapat disamai oleh kinerja sektor pajak daerah lainnya. Pada tahun 2013 dominasi PJU (11,57%) telah dapat diampai oleh komponen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (12,16%) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (20,44%). Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja komponen aktif di sektor pendapatan pajak. Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan dan telah melakukan berbagai sosialisasi pranata dan regulasi untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya perolehan pajak dan retribusi daerah.

## **2) Target dan Realisasi Belanja**

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Perda perubahan APBD 2014 belanja dianggarkan sebesar Rp. 792,186,217,513.37 dengan realisasi Rp. 631,338,836,255.00 atau dengan rasio secara keseluruhan 79,70%. Pada tahun sebelumnya yakni 2013 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 670,557,782,777.31 dengan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 571,033,131,778.17 sehingga belanja tahun 2014 meningkat 31,22% senilai

Rp.135,844,572,117.45. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>BELANJA</b>	792,186,217,513.37	631,338,836,255.00	79.70
<b>BELANJA OPERASI</b>	559,167,433,143.37	494,711,950,721.00	88.47
Belanja Pegawai	313,470,218,554.37	281,911,132,610.00	89.93
Belanja Barang	159,177,938,589.00	136,727,985,058.00	85.90
Belanja Hibah	47,263,200,000.00	41,211,354,600.00	87.20
Belanja Bantuan Sosial	17,352,260,000.00	14,454,462,453.00	83.30
Belanja Bantuan Keuangan	21,903,816,000.00	20,407,016,000.00	93.17
<b>BELANJA MODAL</b>	231,268,784,370.00	136,626,885,534.00	59.08
Belanja Tanah	22,355,550,000.00	10,654,537,979.00	47.66
Belanja Peralatan dan Mesin	44,513,955,224.00	23,494,055,887.00	52.78
Belanja Bangunan dan Gedung	108,232,630,480.00	51,140,904,373.00	47.25
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	47,081,523,266.00	44,011,909,545.00	93.48
Belanja Aset Tetap Lainnya	9,085,125,400.00	7,325,477,750.00	80.63
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	1,750,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Tak Terduga	1,750,000,000.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015

Komposisi belanja Pemerintah Kota Batu pada tahun 2014 terdistribusi 51,22% merupakan Belanja Tidak Langsung dan 48,47% adalah Belanja Langsung. Secara keseluruhan, pada tahun 2013, porsi terbesar belanja daerah teralokasikan pada Belanja Pegawai (BTL) sebesar Rp.239,024,105,379.17 dengan rasio 41,86% dari total realisasi belanja tahun 2013 sedangkan Belanja Modal meliputi 27,49% senilai Rp.156,992,549,723.00, serta belanja barang dan jasa senilai Rp.98,700,625,621.00 dengan rasio 17,28% dari total belanja daerah secara keseluruhan.

### **3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Sebagaimana kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dan mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profibilitas, kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro dan menengah;
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013;

Untuk mendukung terciptanya stabilitas Keuangan Daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel berikut menyajikan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kota Batu selama periode tahun 2014:

**Tabel 2.9 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2014**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(113,585,766,880.37)	70,135,570,716.04	(61.75)
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	115,011,695,680.37	114,844,549,105.86	99.85
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	115,011,695,680.37	114,844,549,105.86	99.85
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	1,425,928,800.00	425,928,800.00	29.87
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	425,928,800.00	425,928,800.00	100.00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	113,585,766,880.37	114,418,620,305.86	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	0.00	184,554,191,021.90	

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015

Bagian Pembiayaan Daerah seperti tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2013 meliputi jenis belanja sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yakni tahun 2013 sebesar Rp. 184,554,191,021.90.
2. Belanja Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2014 dianggarkan Rp.0,00 dan terealisasi Rp.0,00.
3. Penerimaan Utang pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dari BPD Jatim.
4. Pembayaran pokok utang pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 425,928,800.00 dan dapat direalisasikan 100,00% pada periode tersebut.

5. Pada tahun anggaran 2014, secara keseluruhan telah terjadi surplus anggaran sebesar Rp.70,135,570,716.04. Nilai ini berarti melampaui prediksi anggaran tahun ini yang semula dianggarkan defisit (Rp.113,585,766,880.37).

#### 4) Neraca Daerah

Tabel 2.10 N E R A C A Per 31 Desember 2010 – 2014

URAIAN	2012	2013	2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	99,166,564,398.07	115,012,060,679.97	184,554,191,021.86
Investasi Jangka Pendek	24,548,456,692.00	0.00	0.00
Piutang	833,845,282.00	42,433,191,858.68	55,384,065,805.68
Piutang Lain-lain	3,813,632,245.33	3,485,286,266.98	2,632,411,809.00
Piutang Dana Bagi Hasil	4,019,285,043.00	8,464,212,507.00	0.00
Persediaan	1,972,324,305.43	4,125,357,903.69	2,925,017,146.34
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>134,354,107,965.83</b>	<b>173,520,109,216.32</b>	<b>245,495,685,782.88</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Non Permanen	5,351,788,000.00	2,250,365,000.00	2,250,365,000.00
Investasi Permanen	16,820,463,731.74	18,805,783,519.74	-
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>22,172,251,731.74</b>	<b>21,056,148,519.74</b>	<b>2,250,365,000.00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	199,705,802,982.00	192,866,708,701.00	207,620,066,680.00
Peralatan dan Mesin	163,118,843,425.08	179,255,992,519.00	201,301,768,833.38
Gedung dan Bangunan	213,985,886,708.56	242,377,972,348.00	343,757,512,901.56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	210,020,358,318.08	282,037,746,280.00	296,414,019,544.38
Aset Tetap Lainnya	28,832,103,775.25	32,299,766,418.00	39,457,307,112.25
Konstruksi dalam Pengerjaannya	43,055,416,260.84	42,160,582,692.00	42,357,817,691.84
Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>858,718,411,469.81</b>	<b>970,998,768,958.00</b>	<b>1,130,908,492,763.41</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	
Aset Tidak Berwujud	1,578,847,212.00	2,042,095,206.00	3,111,505,566.00
Aset Lain-lain	18,244,754,726.21	25,085,672,937.21	11,324,094,182.31
<b>JUMLAH ASET LAIN-LAINNYA</b>	<b>19,823,601,938.21</b>	<b>27,127,768,143.21</b>	<b>14,435,599,748.31</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,035,068,373,105.59</b>	<b>1,192,702,794,837.27</b>	<b>1,393,090,143,294.60</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00
Utang Pajak	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
Pendapatan diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,751,054,558.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,751,054,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00
Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,751,054,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	99,155,725,898.07	115,011,695,680.37	184,554,191,022.26
Cadangan untuk Piutang	33,215,451,613.33	54,382,690,632.68	58,016,477,614.70
Cadangan untuk Persediaan	1,972,324,305.43	4,125,357,903.69	2,925,017,146.34
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(1,751,054,558.00)	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	10,838,500.00	365,000.00	-
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>132,603,285,758.83</b>	<b>173,520,109,216.74</b>	<b>245,495,685,783.30</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	22,172,251,731.74	21,056,148,519.74	2,250,365,000.00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	858,718,411,471.81	970,998,768,958.00	1,130,908,492,763.41
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk dana cadangan)	19,823,601,938.21	27,127,768,143.21	14,435,599,748.31
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>900,714,265,141.76</b>	<b>1,019,182,685,620.95</b>	<b>1,147,594,457,511.72</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>			
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1,033,317,550,900.59</b>	<b>1,192,702,794,837.69</b>	<b>1,393,090,143,295.02</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,035,068,605,458.59</b>	<b>1,192,702,794,837.69</b>	<b>1,393,090,143,295.02</b>

Sumber: BPKAD, 2009-2015

Neraca tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tersebut dalam keadaan likuid dan solvable. Perkembangan positif terutama ditunjukkan dari perkembangan sisi asset baik asset lancar maupun asset tetap. Di sisi lain, secara financial Pemerintah Kota Batu dapat

dikatakan tidak memiliki kewajiban yang mengikat dan/atau mendesak yang dapat mengganggu kegiatan operasionalnya. Dari sisi ekuitas terlihat bahwa peranannya sangat dominan sebagai kontradiksi dari pendanaan dari sektor utang. Berdasarkan neraca tersebut di atas, secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan sebagai berikut:

### 5) Rasio Keuangan Pemerintah Kota Batu Terhadap APBD Tahun 2007 Sampai dengan Tahun 2014

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Kota Batu menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Batu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Perhitungan dilakukan melalui rumus berikut dengan hasil sebagaimana terdapat pada Tabel 2.11.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat, Propinsi \& Pinjaman}}$$

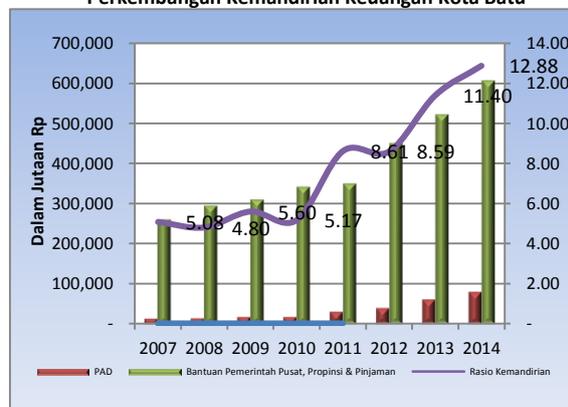
**Tabel 2.11 Rasio Kemandirian**

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi & Pinjaman	Rasio Kemandirian
1	2	3	4 = 2/3*100
2007	13,283,274,381.07	261,681,362,676.25	5.08
2008	14,202,630,312.49	295,851,799,185.27	4.80
2009	17,386,741,568.44	310,655,722,919.00	5.60
2010	17,735,602,953.95	343,297,801,294.00	5.17
2014	30,257,308,053.14	351,230,610,935.00	8.61
2012	38,794,059,670.38	451,560,218,901.00	8.59
2013	59,670,741,826.29	523,440,166,720.00	11.40
2014	78,288,135,526.04	607,775,400,048.00	12.88

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015 - Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Batu masih relatif rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat/propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Data di atas, meskipun terjadi perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2013 dan 2014, menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Batu. Sebagaimana ditetapkan dan disepakati oleh Bank Dunia, standar rasio kemandirian yang baik adalah sebesar 20,0. Angka ini merupakan hasil penelitian dan ditetapkan merupakan angka ukuran standar pemerintah daerah untuk dapat menjalankan dengan baik fungsi otonomi daerah.

Gambar 2.10  
Perkembangan Kemandirian Keuangan Kota Batu



Angka rasio kemandirian Kota Batu tahun 2014 adalah 12,88% (yakni <20,0%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu secara finansial (*financially dependent*) terhadap bantuan pihak eksternal, seperti halnya mayoritas pemerintah daerah lainnya, masih

tinggi. Namun demikian seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Batu cenderung meningkat secara berkelanjutan mulai 3,08 tahun 2007 menjadi 11,40 tahun 2013 dan mencapai 12.88 pada tahun 2014.

## 6) Rasio Aktivitas/Keserasian

### a. Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi APBD Pemerintah Kota Batu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebagai prasyarat yang bersifat mutlak adanya/diperlukannya pemerintah daerah. Pos ini mencakup pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus di bawah ini dengan hasil ditunjukkan pada Tabel 2.12.

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

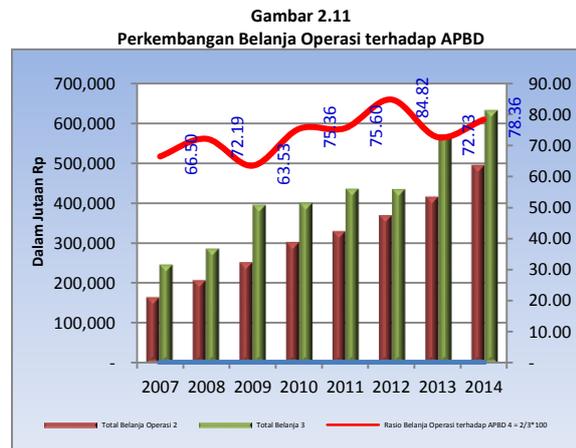
**Tabel 2.12 Rasio Belanja Operasi terhadap APBD**

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap APBD
1	2	3	4 = 2/3*100
2007	164,019,631,340.00	246,661,476,210.00	66.50
2008	206,954,994,312.44	286,689,994,653.44	72.19
2009	251,217,356,723.50	395,421,064,071.50	63.53
2010	301,993,746,772.50	400,760,875,754.53	75.36
2014	329,515,269,131.00	435,856,317,399.00	75.60
2012	369,132,629,645.72	435,188,559,660.72	84.82
2013	415,492,953,661.50	571,285,160,689.50	72.73
2014	494,711,950,721.00	631,338,836,255.00	78.36

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015 - Data diolah

Sejak tahun 2007, porsi pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Kota Batu masih relatif tinggi. Secara ideal, porsi pembiayaan operasional harus seimbang (*fifty-fifty*) dan bahkan

lebih kecil (<50% dari total belanja) dibandingkan dengan pembiayaan modal dan/atau pembiayaan untuk pembangunan secara riil yang langsung menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Batu, Selama lima tahun terakhir, rasio ini berfluktuasi dengan kecenderungan sedikit meningkat.



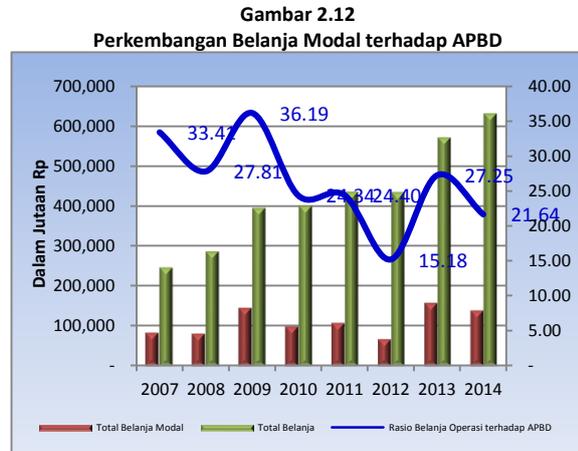
Salah satu komponen penting dalam belanja operasi adalah belanja pegawai yang merupakan indikator penting fleksibilitas pemerintah daerah. Apabila rasio belanja pegawai mencapai 50% ke atas, maka pemerintah yang bersangkutan tidak diperbolehkan menambah pegawai baru serta perlu melakukan pengendalian biaya pegawai. Rasio belanja pegawai (belanja tidak langsung) Kota Batu selama lima tahun terakhir adalah 39,74% (2009); 42,56% (2010); 43,74% (2014); 42,00% (2012); serta 41,84% tahun 2013 dan turun menjadi 40,39% tahun 2014 yang menandakan masih cukup ideal. Meskipun masih berada pada level 'aman' namun rasio ini mendapat perhatian serius. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu terus berupaya untuk mencapai porsi yang ideal dalam rangka menyehatkan keuangan pemerintah daerah sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik serta memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan

dalam RPJMD tahun 2012-2017.

**b. Rasio Belanja Modal Terhadap APBD**

Sebagai pembanding dan/atau kabalikan dari rasio belanja operasi terhadap

APBD adalah diketahuinya Rasio Belanja Modal terhadap APBD yang dihitung dengan rumus di bawah ini yang hasil perhitungannya disajikan pada Tabel 2.13.



$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

**Tabel 2.13 Rasio Belanja Modal terhadap APBD**

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap APBD
1	2	3	4 = 2/3*100
2007	82,415,344,870.00	246,661,476,210.00	33.41
2008	79,735,000,341.00	286,689,994,653.44	27.81
2009	143,102,657,348.00	395,421,064,071.50	36.19
2010	97,543,062,910.03	400,760,875,754.53	24.34
2014	106,341,048,268.00	435,856,317,399.00	24.40
2012	66,055,930,015.00	435,188,559,660.72	15.18
2013	155,660,707,028.00	571,285,160,689.50	27.25
2014	136,626,885,534.00	631,338,836,255.00	21.64

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015 - Data diolah

Sejak tahun 2007, porsi belanja operasi Kota Batu, sebagaimana sebagian besar pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia, lebih besar jika dibandingkan dengan belanja modalnya. Semenjak tahun 2010, rasio ini meningkat yakni dari 24,34% (2010); 24,40% (2014); turun menjadi 15,18% (2012);

kemudian meningkat menjadi 27,25% tahun 2013 dan pada tahun 2014 turun menjadi 21,64%.

Gambar 2.12 menunjukkan rasio belanja modal terhadap APBD Kota Batu yang fluktuatif namun terlihat adanya penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun sejak tahun 2007. Meskipun jumlah APBD terus meningkat terus meningkat namun porsi belanja modal cenderung menurun kontribusinya yakni dari 33,41% (2007) menjadi 27,25% (2013) dan kembali menurun menjadi 21,64% (2014).

Pemerintah Kota Batu terus berupaya memperbaiki besaran rasio ini terutama dalam rangka memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## 7) Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan PAD nya yang telah dicapai dari periode ke periode serta mencermati kecenderungannya melalui perhitungan rumus di bawah ini. Tabel 2.14 menyajikan hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kota Batu tahun 2007-2014.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RP } X_n - X_{n-1}}{\text{RP } X_{n-1}} \times 100\%$$

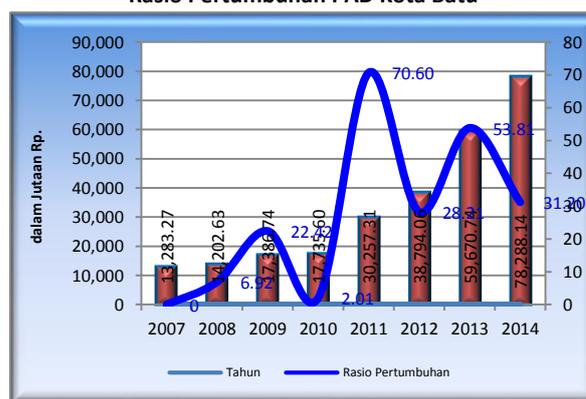
**Tabel 2.14 Rasio Pertumbuhan PAD**

Tahun	PAD	Rasio Pertumbuhan
1	2	3
2007	13,283,274,381.07	0
2008	14,202,630,312.49	6.92
2009	17,386,741,568.44	22.42
2010	17,735,602,953.95	2.01
2014	30,257,308,053.14	70.60
2012	38,794,059,670.38	28.21
2013	59,670,741,826.29	53.81
2014	78,288,135,526.04	31.20

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015 - Data diolah

Rasio pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari 6,92% pada tahun 2008 menjadi 22,42% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 turun menjadi hanya sebesar 2,01%. Pertumbuhan tahun 2010 tidak sebesar pertumbuhan tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Realisasi PAD dari tahun 2009 ke tahun 2010 tidak signifikan, hanya sebesar Rp.348.861.385,51. Pada Tahun 2013 pertumbuhan PAD dapat dikatakan signifikan yakni sebesar 53,81% dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 2.13**  
**Rasio Pertumbuhan PAD Kota Batu**



Sumber: Hasil analisis, 2015

Hal ini mengindikasikan semakin gencarnya upaya Pemerintah Kota Batu untuk memaksimalkan perolehan PAD dalam koridor tetap tidak memberatkan masyarakat terutama para pelaku usaha di Kota Batu. Pada tahun 2013 ini perolehan PAD dari sector pajak telah melampaui target yang dianggarkan serta dalam komposisinya terjadi perbaikan yang diharapkan dimana komponen aktif sector pajak yakni pajak sector pariwisata mulai mampu menggeser pos pajak PJU yang merupakan komponen pasif dan selama ini merupakan sumber penerimaan utama.

Tahun 2014 jumlah PAD meingkat cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp.59,57 milyar (2013) menjadi Rp.78,29 milyar (2014). Tetapi peningkatan tersebut belum terlihat secara kualitatif (berkualitas) karena rasio pertumbuhan PAD justru mengalami penurunannya yakni dari 53,81% (2013) menjadi 31,20% (2014). Hal ini bisa disebabkan oleh besaran target PAD yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya terlalu rendah sehingga kurang mencerminkan potensi yang sesungguhnya terutama pada tahun 2012.

### **8) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti

pemungutan PAD tersebut belum efisien. Rumus di bawah ini digunakan untuk menghitung rasio ini dan Tabel 2.15 menyajikan hasil perhitungannya.

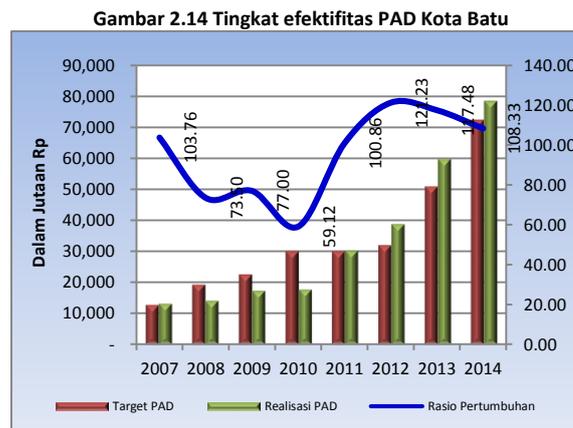
$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

**Tabel 2.15 Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Pertumbuhan
2007	12,802,148,511.75	13,283,274,381.07	103.76
2008	19,323,649,999.69	14,202,630,312.49	73.50
2009	22,581,000,000.00	17,386,741,568.44	77.00
2010	30,000,000,000.00	17,735,602,953.95	59.12
2014	30,000,000,000.00	30,257,308,053.14	100.86
2012	32,000,000,000.00	38,794,059,670.38	121.23
2013	50,793,502,612.24	59,670,741,826.29	117.48
2014	72,269,056,000.00	78,288,135,526.04	108.33

Sumber: BPKAD Kota Batu, 2015 - Data diolah

Sejak tahun 2014, target perolehan PAD Kota Batu telah dapat terlampaui setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Batu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu. Untuk memenuhi target tersebut diperlukan upaya dan kerja keras semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Terlihat dari Gambar 2.14 bahwa efektifitas PAD Kota Batu masih fluktuatif setiap tahun, namun sejak tahun 2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara berkelanjutan. Akan tetapi sejak tahun 2012, meskipun jumlah PAD meningkat cukup besar, angka capaiannya cenderung mulai menurun dari 121,23% (2012) turun ke 117,48% (2013), kemudian turun lagi menjadi 108,33% (2014).



Sumber: Hasil analisis, 2014

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Batu

### Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

- a) Masih adanya masyarakat buta huruf yang sudah dientaskan menjadi buta huruf kembali;
- b) Rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah kejuruan
- c) Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
- d) Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum
- e) Dalam menentukan tunjangan yang diperoleh untuk guru TK dan KB masih sering terjadi penerimaan double, sehingga yang bersangkutan harus mengembalikan pada kas negara.
- f) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik yang ditangani oleh Kursus ataupun PKBM masih mendapat perhatian yang sangat minim dari masyarakat (Animo masyarakat sangat minim).
- g) Keterbatasan tenaga IT dalam rangka mensukseskan program-program daerah dan pusat.
- h) Keterbatasan sekolah dalam pengumpulan data.

- i) Penambahan data setelah PPDB tahun 2014 terdapat penambahan siswa.
- j) Pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan volume kebutuhan sehingga terjadi kelebihan anggaran
- k) Kegiatan rutin Tingkat Provinsi Jawa Timur yang wajib diikuti tidak ada anggarannya. Yaitu berupa kegiatan:
  - l) Paskibra Tingkat Propinsi Jawa Timur.
  - m) Bimtek dan Pelatihan Tingkat Propinsi Jawa Timur.
  - n) Gerak Jalan Mojokerto - Surabaya Tingkat Propinsi Jawa Timur.
  - o) Kegiatan seleksi dan pembinaan atlit pra POPDA untuk cabang olahraga Bola Besar (Sepak Bola, Bola Basket dan Bola Volley) untuk sub Rayon Wilayah Jawa Timur tidak dianggarkan pada tahun 2014.

## **2. Kesehatan**

- a) Belum terlindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan
- b) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
- c) Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi
- d) Masih adanya anemi gizi pada ibu hamil
- e) Masih adanya kasus balita gizi buruk dari kelompok keluarga miskin
- f) Adanya sebagian masyarakat berperilaku buruk pada kesehatan lingkungan
- g) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum mencapai target, dimana target capaian tahun 2014 adalah 95% sedangkan yang tercapai sebesar 87,50%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan target / sasaran bayi di beberapa desa

terlalu tinggi dari kondisi nyata di lapangan serta sweeping petugas yang kurang maksimal.

- h) Cakupan penemuan penderita pneumonia balita belum mencapai target, dimana target cakupan tahun 2014 adalah yaitu 90% sedangkan yang tercapai hanya 16,40%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai tata laksana pneumonia serta tidak semua pelayanan kesehatan swasta mengirimkan laporan kasus pneumonia.
- i) Cakupan penemuan penderita TB – BTA positif belum mencapai target, dimana target cakupan tahun 2014 yaitu 80% sedangkan yang tercapai sebesar 30,58%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan penjarangan suspect yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi angka temuan BTA (+).
- j) Capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin sebesar 18,73% dari target pada tahun 2014 sebesar 35%. Target indikator sebesar 35% merupakan target optimal dari masyarakat miskin yang mengakses pelayanan kesehatan dasar. Capaian indikator sebesar 18,73%, bukan berarti target tersebut tidak tercapai. Hal ini memberikan indikasi bahwa: derajat kesehatan masyarakat di Kota Batu khususnya masyarakat miskin sudah semakin membaik dan optimal.
- k) Capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 5,03 % dari target pada tahun 2014 sebesar 70%. Target indikator sebesar 70% merupakan target optimal dari masyarakat miskin yang dirujuk ke fasilitas kesehatan strata II baik dalam bentuk Rawat jalan tingkat lanjut ( RJTL) maupun Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di Rumah Sakit Paru Batu dan RS Baptis Batu. Capaian indikator sebesar 5,03% tersebut

mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 29,15%, dimana hal ini bukan berarti target tersebut tidak tercapai namun memberikan indikasi bahwa: derajat kesehatan masyarakat di Kota Batu khususnya masyarakat miskin dan kemampuan puskesmas menangani masalah kesehatan sudah semakin membaik dan optimal.

### **3. Pekerjaan Umum**

#### **a. Sumber Daya Air**

- 1) Turunnya daya dukung area resapan air (run off yang berlebihan)
- 2) Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air
- 3) Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu
- 4) Lambatnya progres Pembebasan tanah pada lahan milik perhutani;
- 5) Meningkatnya lahan Kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS
- 6) Tingginya Laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

#### **b. Kebinamargaan**

- 1) Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan
- 2) Keterbatasan alokasi pembiayaan penambahan panjang jalan ;

#### **c. Infrastruktur Permukiman**

- 1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
- 2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
- 3) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage),

- 4) Keterlambatan proses pelelangan melalui LPSE serta alokasi anggaran yang dilakukan penyesuaian melalui PAK tahun 2014

#### **4. Perumahan**

- 1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
- 2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
- 3) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage),
- 4) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau,
- 5) Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan,
- 6) Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan.
- 7) Tugas dan fungsi : terbatasnya penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kota Batu.
- 8) Kewenangan penanganan pengelolaan peningkatan kualitas sehat permukiman yang seharusnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan justru masih menjadi kewenangan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang. Padahal seharusnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan. Contoh: pavingisasi lingkungan, drainase lingkungan permukiman, instalasi pengolahan limbah / IPAL.
- 9) Penempatan pejabat teknis di bidang-bidang yang belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Contoh : Bidang perumahan diisi oleh tenaga teknis berlatar belakang Insinyur/Sarjana Teknik

## **5. Penataan Ruang**

### **a. Kesenjangan Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

### **b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## **6. Perhubungan**

- 1) Timbulnya permasalahan yang kompleks dan sistematis dibidang transportasi akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
- 2) Sirkulasi arus persimpangan sering terjadi masalah, karena Traffic Light
- 3) yang ada sudah masuk masa penggantian (lebih dari 10 tahun)
- 4) Banyaknya kendaraan yang mati ujinya terlalu lama dan tidak dapat ditelusuri keberadaan dan posisi kendaraan tersebut
- 5) Kurangnya kesadaran bagi pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya;
- 6) Kegiatan DAK dalam pelaksanaannya, masih menunggu teknis dari kementerian perhubungan tentang penggunaan dana alokasi khusus bidang keselamatan transportasi

## **7. Lingkungan Hidup**

- 1) Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Kota Batu, yaitu Sungai Brantas, yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas pada Tahun 2012, khususnya pada parameter BOD yakni sebesar 3,67 mg/l yang berarti masih belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air yakni sebesar 2 mg/l.
- 2) Rusaknya kawasan konservasi Tahura R. Soeryo dan sekitar sumber air S. Brantas, termasuk keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis Tahura R. Soeryo yang sampai dengan awal Tahun 2012 masih sekitar 2.675 Ha. Selain itu kondisi DAS Brantas yang semula memiliki 1.577 sumber air dan yang berada di Malang Raya sejumlah 467, saat ini yang berfungsi hanya 230, serta yang berada di Kota Batu 118 yang berfungsi hanya 57 sumber air.
- 3) Selain itu juga rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi yang mengakibatkan lahan kritis, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis di luar kawasan hutan sampai, dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kota Batu.
- 4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim, pada berbagai kegiatan yang berpotensi sebagai sumber Emisi GRK, yaitu pertanian, kehutanan, transportasi, energy, industry dan limbah. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK, maka Kota Batu telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana

Aksi Daerah (RAD) GRK 2011 – 2020. Fokus utama RAD GRK Kota Batu adalah inisiatif lokal, kesesuaian konteks, dan tindakan. Proses penyusunan RAD GRK dilakukan dengan berdasar kepada basis teknis dan ilmiah yang kuat dengan pengayaan dari *stakeholder* pembangunan. Pelibatan pelaku-pelaku pembangunan ini dimaksudkan agar substansi RAD GRK yang dihasilkan kemudian dapat didukung implementasinya. Penyusunan RAD GRK berdasarkan kesesuaian dengan RPJP, RPJM Kota Batu dan juga RAN-GRK yang merupakan proses *bottom-up* dan menggambarkan langkah yang akan ditempuh dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk masing-masing sektor (pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah) melalui perhitungan seberapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan target pengurangannya.

#### 5) Bencana Alam

a) Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam; Banyak wilayah Kota Batu yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (*early warning system*), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting dan dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi” (*Geological Hazards Mapping*) perlu dipetakan secara baik sehingga rencana tata ruang yang disusun dan pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal;

- b) Banyaknya desa rawan bencana yang masih belum dibentuk sebagai Desa Tangguh, karena pihak Kab/Kota belum peduli;
  - c) Masih rendahnya pengetahuan di sekolahan akan Penanggulangan bencana, karena masih banyak sekolah yg belum dilatih dan keterbatasan pendanaan.
- 6) Belum dilakukannya pengujian kualitas air limbah oleh Laboratorium Kota, hal ini mengingat Laboratorium pemerintah Kota Batu belum memiliki akreditasi sehingga belum memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat tanda bukti hasil pengujian. Sehingga pengujian dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu Laboratorium Jasa Tirta Malang. Laboratorium Pemerintah Kota Batu melakukan pendampingan atas pengujian tersebut dan melakukan analisa deviasi atas perbedaan hasil pengujian
  - 7) Pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran tidak dilakukan, hal ini disebabkan industri target pengujian pada tahun berjalan (2014) sudah tidak beroperasi secara kontinyu, artinya bahwa produksi dilakukan hanya ketika ada order.
  - 8) Pelayanan ini belum dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu disebabkan belum teralokasinya anggaran untuk kegiatan tersebut
  - 9) Alokasi anggaran yang belum memadai, menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan SPM
  - 10) Alokasi anggaran yang memadai untuk SPM sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM dapat optimal;
  - 11) Pemahaman terhadap SPM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan, mengingat

kelembagaan Lingkungan Hidup yaitu Kantor Lingkungan Hidup masih tergolong baru terbentuk pada tahun 2009.

#### **8. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- 2) Masih perlunya menekan angka pertumbuhan penduduk agar tercipta kualitas penduduk yang memadai sebagai generasi penerus bangsa.

#### **9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- 2) Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
- 3) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender;
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT;
- 5) Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender;

#### **10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program SIAK yang diberlakukan masih belum bersifat nasional, sehingga masih dimungkinkan penduduk yang bermukim di luar Kota Batu memiliki KTP Kota Batu.

#### **11. Sosial**

- 1) Keterbatasan akses PMKS termasuk orang miskin terhadap fasilitas-fasilitas ekonomi social dan pendidikan.

- 2) Masih rendahnya apresiasi keluarga dan masyarakat terhadap MPKS khususnya ketunaan
- 3) Potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat belum berperan maksimal karena belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.
- 4) Keterbatasan akses PMKS termasuk orang miskin terhadap fasilitas-fasilitas ekonomi social dan pendidikan.
- 5) Masih rendahnya apresiasi keluarga dan masyarakat terhadap MPKS khususnya ketunaan
- 6) Potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat belum berperan maksimal karena belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.
- 7) Masih terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS, tingginya angka penyalagunaan narkoba dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS;
- 8) Masih rendahnya manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bidang penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

## **12. Ketenagakerjaan**

- 1) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
- 2) Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.

## **13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- 1) Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.
- 2) Belum optimalnya kelembagaan koperasi
- 3) Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan.
- 4) Masih rendahnya daya saing produk UMKM.

#### **14. Penanaman Modal**

- 1) Pada tahun 2014 Kondisi makro ekonomi masih fluktuatif
- 2) Belum optimalnya promosi investasi,
- 3) Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi se Kota Batu,
- 4) Masih lambatnya realisasi investasi; dan
- 5) Masih sedikitnya investasi di industri hilir.
- 6) Kota Batu secara geografis dan keadaan alamnya kurang cocok untuk sektor industri terutama industri besar yang padat modal
- 7) Infrastruktur penunjang untuk menuju destinasi pariwisata internasional masih terbatas.
- 8) Pertumbuhan investasi di Kota Batu mengalami perlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor makro ekonomi antara lain: kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif dasar listrik yang berpengaruh negatif terhadap perusahaan skala kecil.
- 9) Adanya sentimen negatif akibat adanya rencana kenaikan UMK Kabupaten/Kota di tahun 2015.
- 10)Belum tersusunnya sistem informasi sumber daya dan potensi unggulan daerah.
- 11)Belum tersusunnya peta penanaman modal daerah.
- 12)Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi.
- 13)Peningkatan promosi produk unggulan daerah dan kerjasama investasi

#### **15. Kebudayaan**

- 1) Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
- 2) Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.

#### **16. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Masih rendahnya kualitas pemuda.

- 2) Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya.
- 3) Masih kuranya sarana prasarana olah raga.
- 4) Masih rendahnya kualitas atlit
- 5) Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda
- 6) Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat
- 7) Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga

#### **17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik
- 3) Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- 4) Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan keteriban.
- 5) Kurangnya Tenaga PNS pada pengelolaan Keuangan dan banyaknya tenaga Non PNS.
- 6) Kurangnya Tenaga yang bersertifikasi Barang Jasa, sehingga pejabat Pengadaan Barang Jasa dari luar Kantor Kesbang
- 7) Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Kesbang belum memadai terutama ruangan gedung kantor yang masih sempit

- 8) dan belum adanya ruangan penyimpanan arsip, kurangnya Peralatan Kantor ( Komputer ) dan Mebelair
- 9) Belum mencukupi sarana prasarana deteksi dini bidang intelegen ( Alat Kominikasi, seragam dan atribu dan alat peyadap )
- 10)Masih belum teranggarkan dan untuk penyelesaian dan mediasi sengketa ormas, politik karena keterbatasan anggaran yang ada

**18. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

- 1) Pengumpulan data agregasi pada LPPD tidak sinkorn dengan data yang ada pada SKPD Kota Batu pelaksanan urusan wajib dan pilihan
- 2) Belum mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Desa berbasis Ilmu Teknologi (IT);
- 3) Program kerja sama antar SKPD kurang berjalan optimal;
- 4) Masih banyak kasus-kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor)
- 5) Pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- 6) Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;
- 7) Belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

## 19. Ketahanan Pangan

- 1) Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah / desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan
- 2) Keterbatasan dana dukungan DAU maka pengujian hanya secara sederhana, tanpa adanya pengujian laboratorium, sehingga pengujian untuk BMR (Batas Minimum Residu) yang membutuhkan dana besar tidak mampu dilaksanakan. Padahal tingginya tingkat konsumsi masyarakat secara umum terhadap bahan makanan segar sehingga kelayakannya perlu mendapatkan perhatian penting
- 3) Wilayah Kota Batu bukan potensi produsen beras untuk terwujudnya ketersediaan pangan pokok (beras) masih tergantung distribusi pangan dari daerah lain, untuk itu perlu mengoptimalkan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat dan mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
- 4) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan
- 5) Kurangnya apresiasi masyarakat dalam partisipasi kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- 6) Masyarakat secara umum hanya menjalankan kegiatan ketika anggaran turun, ketika pendampingan anggaran sudah tidak ada kegiatan tersebut ikut berhenti dan tidak berlanjut
- 7) Sumber Daya Manusia anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas relatif masih rendah
- 8) Aktifitas anggota kelompok afinitas heterogen sehingga sulit untuk digabungkan menjadi satu jenis kegiatan

- 9) Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Pendamping kegiatan (Penyuluh Pertanian) berada pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

## **20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatoha pemberdayaan masyarakat;
- 2) Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Kurangnya komitmen penentu kebijakan terhadap penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

## **21. Kearsipan**

Kurangnya sosialisasi serta bimbingan teknik teknik tentang kearsipan.

## **22. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan bentang geografis Kota Batu yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia.

Selanjutnya terkait dengan media elektronik yang ada di Kota Batu, Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga

penyiaran televisi sehingga masih belum bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap radio yang masih belum optimal. Disamping itu sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring Isi Siaran) masih terbatas dan sangat sederhana;

## **Urusan Pilihan**

### **1. Pertanian**

- 1) Hambatan dan/atau kendala utama yang dihadapi adalah bahwa Pengembangan kawasan organik belum dapat dilaksanakan di seluruh luasan lahan pertanian di masing-masing desa di kawasan organik di wilayah Kota Batu.
- 2) *Light Trap* yang dibagikan kepada kelompok tani sebagian besar belum terpasang
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa sering terlambat tidak sesuai dengan musim tanam petani
- 4) Varietas legal yang dikeluarkan oleh BALITHI (Balai Penelitian Tanaman Hias) tidak seluruhnya sesuai keinginan petani dan diterima pasar.
- 5) Para petani belum terbiasa dengan sistem bertani secara organik
- 6) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian organik.
- 7) Belum optimalnya penyuluhan yang diberikan kepada pihak terkait tentang pertanian organik yang berwawasan kesehatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
- 8) Pameran lokal yang diselenggarakan oleh pihak ketiga tidak dapat diikuti karena tidak tersedia anggaran yang cukup
- 9) Pos anggaran untuk sewa stan pada Pameran Nasional/Regional tidak mencukupi

- 10) Pengadaan *cold storage* dan display market organik tidak dapat terealisasi karena gagal lelang/masalah teknis
- 11) Belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- 12) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- 13) Masih rendahnya daya saing produk pertanian;
- 14) Belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;
- 15) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
- 16) Rendahnya kandungan bahan organik tanah;
- 17) Terbatasnya ketersediaan pakan dan teknologi;
- 18) Jatuhnya harga gabah pada saat panen;
- 19) Peningkatan kebutuhan dan konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman;
- 20) Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan
- 21) Masih adanya lahan kritis

## **2. Kehutanan**

- 1) Usulan kegiatan terkait dengan bantuan bibit tanaman, pupuk dan alat-alat pengolahan hasil perkebunan secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat
- 2) Pembangunan kawasan tanpa asap rokok belum bisa dilaksanakan karena waktu yang sangat terbatas
- 3) Pembangunan fisik/konservasi tanah hanya mencapai target 20% karena anggaran yang sangat terbatas
- 4) Proses penyelesaian kegiatan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) Desa Oro-oro Ombo belum tuntas (90%)

- 5) Permintaan bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan penghijauan cukup banyak dari masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber dana DAU

### **3. Energi dan Sumber Daya Mineral**

- 1) Ketergantungan akan bahan bakar fosil mengakibatkan menipisnya pasokan energi dan perlunya pengembangan Energi Baru dan Terbarukan seperti biogas, air, panas bumi, surya, dan angin.
- 2) Keterbatasan suplai energy dari jaringan listrik PLN
- 3) Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah Pusat dan adanya surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.
- 4) Terdapat kegiatan pertambangan dan pengambilan air tanah yang belum berijin dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat, serta indikasi meningkatnya intensitas pengambilan air tanah., yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

### **4. Pariwisata**

- 1) Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- 2) Belum optimalnya pemantapan *city branding* Batu sebagai Kota Wisata di tingkat internasional;
- 3) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yang kompeten dan professional;
- 4) Perlunya dukungan kerjasama bidang pariwisata yang sinergis antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah

- 5) *City Branding* Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan belum gencar dipromosikan secara internasional.
- 6) Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup banyak sedangkan APBD Kota Batu sangat terbatas.
- 7) Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi.
- 8) Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat untuk siap menjadi manusia pariwisata.
- 9) Kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat terhadap perkembangan pariwisata
- 10) Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional.
- 11) Fasilitas infrastruktur masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar internasional

## **5. Perikanan**

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan;
- 2) Menurunnya potensi Sumberdaya ikan di wilayah Kota Batu,
- 3) Masih rendahnya Kualitas benih dan induk;
- 4) Tingginya Harga pakan ikan pabrikan;

## **6. Perdagangan**

- 1) Terbatasnya lahan sehingga dikhawatirkan mendorong konversi lahan pertanian.
- 2) Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;

- 3) Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- 4) Rendahnya harga jual komoditas tertentu di saat over supply ketika panen raya;

## **7. Perindustrian**

- 1) Kurangnya keterkaitan Struktur Industri, antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, yang terindikasi dari kecilnya komoditas unggulan daerah dengan daya penyebaran dan daya kepekaan tinggi.
- 2) Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif.